



LAPORAN TAHUNAN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PEKALONGAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan 2023 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan ini merupakan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, baik yang menyangkut kegiatan rutin pembangunan maupun kegiatan lainnya di PPN Pekalongan.

Tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan adalah untuk memberikan informasi/gambaran mengenai perkembangan capaian operasional PPN Pekalongan selama Tahun 2023 serta sebagai acuan perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Tahunan yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan *stakeholders* terkait pada khususnya , serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Januari 2024

Kepala PPN Pekalongan



Kartono, A.Pi., M.P.

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Visi dan Misi	5
D. Tujuan	6
E. Manfaat Pelaporan	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI	9
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi	9
1. Kedudukan	9
2. Tugas	9
3. Fungsi	9
B. Struktur Organisasi	11
C. Komposisi Pegawai	10
D. Hubungan Kelembagaan	14
BAB III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN & PERKEMBANGAN	
CAPAIAN KINERJA PELABUHAN	16
A. Alokasi Anggaran	16

B. Realisasi Penyerapan Anggaran	21
C. Perkembangan Penyerapan Anggaran	24
D. Capaian Kinerja Pelabuhan	24
BAB IV. KERAGAAN OPERASIONAL	26
A. Produksi dan Harga Ikan	26
B. Musim Penangkapan	27
C. Daerah Penangkapan Ikan	28
D. Armada Perikanan	28
E. Jenis Ikan Hasil Tangkapan	30
F. Pengolahan dan Pemasaran Ikan	33
G. Nelayan	36
H. Inspeksi Pengendalian Mutu	37
I. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	38
J. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	40
K. Log Book Penangkapan Ikan	41
L. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)	42
M. Operasional Kesyahbandaran	43
BAB V. KERAGAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PELABUHAN	45
A. Kegiatan Non Fisik	45
1. Persuratan dan Kearsipan.....	45
2. Kunjungan Tamu	46
3. Wisata Bahari	47
4. Pengelolaan Kehumasan	50
5. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja	52
6. Survei Kepuasan Masyarakat	53
7. Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBPN Pascaproduksi	

di PPN Pekalongan.....	58
8. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan	59
9. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan	62
10. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah di PPN Pekalongan.....	64
11. Sosialisasi Penanganan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan	66
12. Pelaksanaan ISO 14001:2015	68
13. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan dan Cara Penanganan Ikan yang Baik	70
14. Diskusi Ringan “Ngopi Bareng” dengan Instansi Terkait	71
15. Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan.....	72
16. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah).....	75
17. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	76
B. Kegiatan Fisik	78
1. Peningkatan Jalan Khusus Komplek.....	78
2. Peninggian Dermaga Bongkar	79
3. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan	80
C. Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	81
1. Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan	81
2. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	82

BAB VI. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	87
A. Permasalahan	87
B. Upaya Pemecahannya	88
BAB VII. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran dan Kritik	89

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	12
Tabel 2. Daftar Pegawai PPN Pekalongan yang memperoleh kenaikan pangkat	13
Tabel 3. Daftar Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tahun 2023	13
Tabel 4. Revisi DIPA PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2023	16
Tabel 5. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023	21
Tabel 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	21
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Pekalongan Tahun 2023.....	24
Tabel 8. Perkembangan Jumlah & Nilai Produksi di PPN Pekalongan Th.2014-2023...	26
Tabel 9. Perkembangan Daerah Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan Tahun 2023.....	28
Tabel 10. Perkembangan armada perikanan berdasarkan Alat Tangkap yang digunakan - di PPN Pekalongan Tahun 2013 – 2023	29
Tabel 11. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan Tahun 2021 - 2023	30
Tabel 12. Perkembangan Volume, Jumlah, Nilai dan Harga rata-rata ikan hasil tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2023	31
Tabel 13. Daerah Tujuan Pemasaran Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan Tahun 2023.....	33
Tabel 14. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di PPN Pekalongan tahun 2013-2023 ...	37
Tabel 15. Perkembangan Kegiatan Inspeksi Pengendalian Mutu Tahun 2023	38
Tabel 16. Perkembangan Evaluasi kinerja UPT PPN Pekalongan Tahun 2023	39
Tabel 17. Perkembangan Pelayanan SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2023	40
Tabel 18. Perkembangan Jumlah Log Book di PPN Pekalongan Tahun 2023	41
Tabel 19. Data Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Periode Tahun 2023.....	42
Tabel 20. Jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar di PPN Pekalongan Tahun 2023.....	44
Tabel 21. Surat Masuk dan Keluar di PPN Pekalongan Tahun 2023	45
Tabel 22. Jumlah Tamu yang berkunjung ke PPN Pekalongan Tahun 2023	47
Tabel 23. Jumlah kunjungan Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2023	48
Tabel 24. Pembaharuan (<i>Updating</i>) Website PPN Pekalongan Tahun 2023.....	51

Tabel 25. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan I Tahun 2023	54
Tabel 26. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan II Tahun 2023.....	55
Tabel 27. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan III Tahun 2023	56
Tabel 28. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan IV Tahun 2023	57
Tabel 29. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	82
Tabel 30. Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Operasional Pelabuhan	85

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pekalongan	11
Gambar 2. Hubungan Kelembagaan	15
Gambar 3. Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	39
Gambar 4. Kegiatan Pengelolaan Persuratan	46
Gambar 5. Grafik Jumlah Kunjungan Wisata Bahari Tahun PPN Pekalongan Tahun 2023.....	48
Gambar 6. Wisata Bahari PPN Pekalongan	49
Gambar 7. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan	52
Gambar 8. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan & Keselamatan Kerja	53
Gambar 9. Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan	59
Gambar 10. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi	61
Gambar 11. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan.....	64
Gambar 12. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah di PPN Pekalongan.....	65
Gambar 13. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan	68
Gambar 14. Pelaksanaan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan.....	70
Gambar 15. Kegiatan Diskusi Ringan “Ngopi Bareng” bersama Instansi Terkait	72
Gambar 16. Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan.....	74
Gambar 17. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (tausiyah).....	75
Gambar 18. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di PPN Pekalongan.....	78
Gambar 19. Peningkatan Jalan Khusus Komplek	79
Gambar 20. Peninggian Dermaga Bongkar.....	80

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur”, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi ke-7 berbunyi mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dimana salah satunya adalah dengan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Salah satu sumber kekayaan laut Indonesia yang melimpah adalah perikanan, terutama perikanan tangkap, yang potensi per tahunnya mencapai jutaan ton. Sejalan dengan hal tersebut, guna mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, dukungan sarana dan prasarana untuk pendaratan baik itu kapal penangkap maupun pengangkut ikan, yaitu Pelabuhan Perikanan, sangatlah penting.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka pemusatan kegiatan perikanan, sehingga dapat dilakukan usaha perikanan pada skala ekonomi yang efisien, dan sekaligus memanfaatkan dampak kegiatan ekonomi yang terjadi didalamnya. Hakikat tersebut tercermin dari penyelenggaraan fungsi pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan, serta pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha. Hal ini disebabkan karena keberadaan pelabuhan perikanan membawa dampak ganda terhadap kegiatan usaha lain yang berbasis pada usaha penangkapan ikan maupun dalam bidang usaha lainnya. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan perikanan dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertuang bahwa visi KKP adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong, yang dijabarkan dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu peningkatan daya saing, dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, turut bertanggung jawab memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan KKP sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, penyelenggaraan kegiatan di PPN Pekalongan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Penyusunan laporan dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah, atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan Tahunan ini menggambarkan capaian kinerja PPN Pekalongan selama tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPN Pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang–undangan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Operasional Pengelolaan PPN Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pedoman & Tata Cara Penanganan Ikan Hasil Tangkapan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi PPN Pekalongan adalah mendukung tercapainya visi Direktorat jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia yang Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Misi PPN Pekalongan juga mengadopsi misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
 - Melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
- b. Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing,
 - Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
- c. Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
 - Melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- d. Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
 - Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

D. Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Tahunan 2023 ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan PPN Pekalongan dan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra PPN Pekalongan;
2. Sebagai bentuk akuntabilitas PPN Pekalongan selaku instansi pemerintah kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP dan pengguna jasa pelabuhan atau masyarakat perikanan lainnya.

E. Manfaat Pelaporan

Penyusunan Laporan Tahunan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan capaian kinerja tahunan 2023 yang telah dilaksanakan PPN Pekalongan;
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Tahun 2023;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2024;
4. Sebagai bentuk keterbukaan informasi selaku instansi pemerintah terhadap pengguna jasa pelabuhan atau masyarakat perikanan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Laporan Tahunan 2023 ini :

1. BAB I. Pendahuluan;

Bab Pendahuluan memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Visi dan Misi, Tujuan Pelaporan, Manfaat Pelaporan, dan Sistematika Penulisan Laporan.

2. BAB II. Struktur dan Tata Kerja Organisasi;

Bab Struktur dan Tata Kerja Organisasi memuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Komposisi Pegawai, dan Hubungan Kelembagaan.

3. BAB III. Realisasi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Pelabuhan;

Bab Realisasi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Pelabuhan memuat Alokasi Anggaran, Realisasi Penyerapan Anggaran, Perkembangan Penyerapan Anggaran dan Capaian Kinerja Pelabuhan.

4. BAB IV. Keragaan Operasional;

Bab Keragaan Operasional memuat Produksi dan Harga Ikan; Musim Penangkapan Ikan; Daerah Penangkapan Ikan; Armada Perikanan; Jenis Ikan Hasil Tangkapan; Pengolahan dan Pemasaran Ikan; Nelayan; Inspeksi Pengendalian Mutu; Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP); Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); *Logbook* Penangkapan Ikan; Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP); dan Operasional Kesyahbandaran.

5. BAB V. Keragaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan;

Bab Keragaan Pembangunan memuat Kegiatan Non Fisik dan Kegiatan Fisik

- Kegiatan Non Fisik memuat Persuratan dan Kearsipan; Kunjungan Tamu; Wisata Bahari; Pengelolaan Kehumasan ; Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5); Survei Kepuasan Masyarakat; Diseminasi Kesyahbandaran di PPN Pekalongan, Sosialisasi Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan, Sosialisasi Kelaikan / Pengujian / Inspeksi Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Sosialisasi Penerapan e-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Sosialisasi Penanganan Kebakaran serta Pengelolaan Sampah Laut dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan ISO 14001:2015; Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan dan Cara Penanganan Ikan yang Baik; Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan; Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah); Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Kegiatan Fisik memuat Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Kontruksi di Pelabuhan Perikanan, Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan, Pemeliharaan/Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya.

6. BAB VI. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya;

Bab VI Permasalahan dan Upaya Pemecahannya menjelaskan tentang kendala-kendala operasional PPN Pekalongan selama Tahun 2023 sekaligus upaya pemecahannya;

7. BAB VII. Penutup;

Bab VII Penutup menjelaskan Kesimpulan, Saran dan Kritik dari seluruh pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.

BAB II. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PPN Pekalongan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

1. Kedudukan

- a) Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b) Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, menyebutkan bahwa susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdiri atas:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

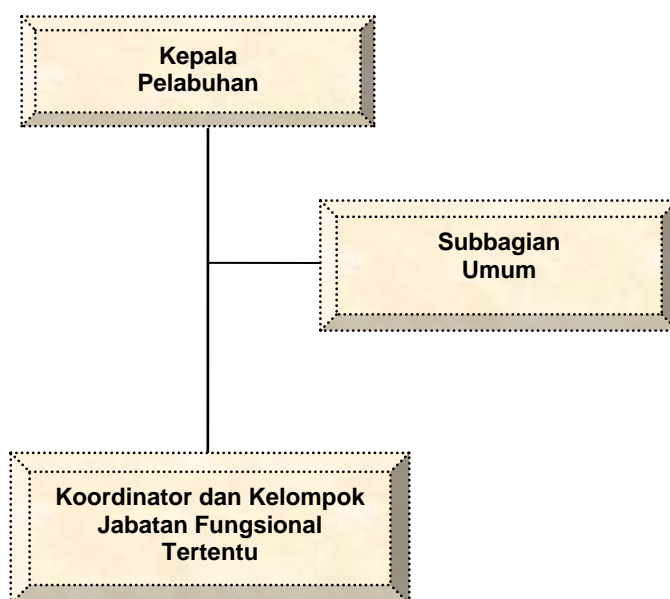
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

PPN Pekalongan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, dengan susunan organisasi terdiri atas :

Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pekalongan



C. Komposisi Pegawai

Komposisi Pegawai PPN Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 64 orang, terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil, 17 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Ketersediaan SDM dalam jumlah yang memadai serta memiliki komposisi masing-masing tugasnya diharapkan dapat memberikan pelayanan prima di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi petugas kepegawaian komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan di PPN Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Total	Pendidikan						Total	
		I	II	III	IV		SD	SMP	SMA	D-3	D4	S1		S2
1	Kepala Pelabuhan				1	1							1	1
2	Kepala Subbagian Umum			1		1						1		1
3	Syahbandar Pelabuhan Perikanan			1		1						1		1
4	Analisis Kesyahbandaran			1		1						1		1
5	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana			1		1						1		1
6	Pengadministrasi Persuratan					0								0
7	Pengelola Barang Milik Negara			2		2						2		2
8	Pengelola Data			2		2			1			1		2
9	Pengelola Kesyahbandaran			3		3			1			2		3
10	Pengelola Keuangan			1		1			1					1
11	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		2	4		6		1	4			1		6
12	Pengolah Informasi Media			1		1						1		1
13	Sekretaris			1		1			1					1
14	Teknisi Sarana dan Prasarana		1			1			1					1
Sub Total		0	3	18	1	22	0	1	9	0	0	11	1	22
15	Analisis Kepegawaian Pelaksana		1			1				1				1
16	Analisis Kepegawaian Pertama			1		1						1		1
17	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda			2		2						2		2
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama			1		1						1		1
19	Arsiparis Ahli Pertama					0						1		1
20	Arsiparis Pelaksana		1			1				1				1
21	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir		2	2		4			3	1				4
22	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula					0			7					7
23	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil		2			2			1	2				3
24	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda			4		4						3	1	4
25	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama			2		2					3	4		7
26	Pranata Humas Ahli Pertama					0						1		1
27	Pranata Humas Pelaksana		1			1				1				1
28	Pratana Keuangan APBN Penyelia			1		1						1		1
29	Pranata Komputer Ahli Pertama					0						1		1
30	Pranata Komputer Terampil					0				1				1
Sub Total		0	7	13	0	20	0	0	11	6	3	14	1	37
JUMLAH		0	10	31	1	42	0	1	20	6	3	25	2	59
31	Pengemudi					0	1							1
32	Pramubakti					0			3	1				4
Sub Total		0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	5
JUMLAH		0	10	31	1	42	1	1	23	7	3	25	2	64

Berdasarkan hasil rekapitulasi petugas kepegawaian selama tahun 2023, komposisi pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana tercantum dalam tabel 2 di bawah ini. Sedangkan untuk penghargaan Satya

Lencana Karya Satya tahun 2023, komposisi pegawai yang menerima juga sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tabel 2. Daftar Pegawai PPN Pekalongan yang memperoleh kenaikan pangkat

No	Nama / NIP	Pangkat	
		Lama	Baru
Periode April 2023			
1	Adyar Repliyanto 196905162002121001	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk.I III/b
2	HB Dwi Agus Sukriyono 196808102002121004	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk.I III/b
3	M.Haidar Hamid, S.Tr.Pi 199507202019021002	Penata Muda III/ a	Penata Muda Tk.I III/ b
4	Suwarni 196612292002121002	Pengatur II/c	Pengatur Tk.I II/d
Periode Oktober 2023			
1	Amelia, S.St.Pi 198404232010122002	Penata III/c	Penata Tk.I III/d
2	Ardhitya Faryndra, S.St.Pi 198803312010121003	Penata III/c	Penata Tk.I III/d
3	Eko Noviwiji Suharyanto., S.M. 198211042006041001	Penata Muda Tk.I III/b	Penata III/c
4	Febri Heriyanto 198302052008011005	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk.I III/b
5	Hyoga Rio Pratama R., S.T 199602092019021003	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk.I III/b

Tabel 3. Daftar Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tahun 2023

No	Nama	Pangkat/GolonganRuang	Masa SLKS
1.	Bambang Priyono, S.H,	Penata Tk.I	30 tahun
2.	Andik Orbaniyanto	Penata Muda Tk. I	30 tahun
3.	Jambari	Penata Muda Tk.I	30 tahun
4.	Kuwatno	Penata Muda Tk.I	30 tahun
5.	Farid Setiyanto, S.Pi.	Penata	20 tahun
6.	Maryono, S.Pi.	Penata Muda Tk.I	20 tahun
7.	Safrudin, S.Pi.	Penata Muda Tk.I	20 tahun
8.	HB Dwi Agus Sukriyono	Penata Muda Tk.I	20 tahun
9.	Adyar Repliyanto	Penata Muda Tk.I	20 tahun

10.	Suwarni	Pengatur Tk.I	20 tahun
11.	Edi Widiyanto	Pengatur	20 tahun

D. Hubungan Kelembagaan

Kegiatan operasional PPN Pekalongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan dapat dilaksanakan secara optimal tidak lepas dari adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuan dari hubungan kerja antarinstansi ini adalah dalam rangka mensinergikan program kegiatan yang berhubungan tugas pokok dan fungsi pelabuhan. Adapun instansi/organisasi yang bersinergi dilingkup kerja PPN Pekalongan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
7. Kantor Satuan Pengawasan SDKP Wilker Pekalongan;
8. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Wilker Pekalongan;
9. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Wilker Pekalongan;
10. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan;
11. PT Perikanan Indonesia (Perindo) Cabang Pekalongan;
12. Pos TNI Angkatan Laut Pekalongan Kota;
13. Satuan Polisi Air dan Udara Polres Pekalongan Kota;
14. Kapal Pengawas Ditpolairud Polda Jawa Tengah;
15. Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilker Pekalongan;
16. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan;
17. UPTD Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
18. KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan;
19. Himpunan Pedagang Ikan Pekalongan (HPIP) Kota Pekalongan;
20. Persatuan Bakul Ikan (PBI) Kota Pekalongan;

21. Himpunan Pemilik Kapal Perikanan Pekalongan (HPKPP);
22. Asosiasi Purse Seine Indonesia (API) Kota Pekalongan;
23. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Pekalongan;
24. Serikat Pekerja TPI Kota Pekalongan.

Sebagai wujud dari pelaksanaan koordinasi antarinstansi, PPN Pekalongan menyelenggarakan kegiatan *sharing session* dan “Ngopi Bareng” dengan instansi terkait guna membangun komunikasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kawasan Pelabuhan, terutama masalah keamanan dan ketertiban. Kegiatan *sharing session* dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Mei 2023, sedang “Ngopi Bareng” dilaksanakan pada hari Rabu, 15 November 2023.

Gambar 2. Kegiatan Hubungan Kelembagaan



BAB III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA PELABUHAN

A. Alokasi Anggaran

Dukungan anggaran untuk pembangunan PPN Pekalongan pada tahun 2023 berjumlah **Rp.15.676.839.000,-** yang merupakan pagu awal tanggal 30 November 2022. Selanjutnya kemudian dilakukan mekanisme *automatic adjustment* yang merupakan Revisi I pada tanggal 27 Desember 2022. Namun demikian hal itu tidak mengurangi jumlah anggaran.

Dalam perkembangannya, anggaran PPN Pekalongan mengalami penurunan sebesar **Rp.586.193.000,-** sehingga nilainya menjadi **Rp.15.090.746.000,-** yang merupakan pembukaan *automatic adjustment* untuk direalokasikan ke BA Bendahara Umum Negara (BA BUN). Adapun Rincian Revisi DIPA Tahun 2023 PPN Pekalongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. Revisi DIPA PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2023

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Pertimbangan
		Nomor	Tanggal					
0	Awal			30/11/2022	Rp.15.676.839.000,-			
1	Revisi 1	B.1172/DJ PT.1/XII/2022 (DJA)		27/12/2022	Rp.15.676.839.000,-	Automatic Adjustment Tahap I		
2	Revisi 2	222/PPN.P KL/RC.42 0/II/2023 (Kanwil Semarang)	14/02/2022	11/02/2022	Rp.15.676.839.000,-	Revisi Administrasi	a. Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA; b. Pemuktahiran Data Hasil	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi, prioritas dan penggunaan anggaran yang terbatas b. Revisi Halaman III DIPA

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Pertimbangan
		Nomor	Tanggal					
							Revisi POK	sesuai realisasi bulan Januari s/d Desember 2023
3	Revisi 3	607/PPN.P KL/RC.42 0/IV/2023 (Kanwil Semarang)	14/04/2022	08/04/2022	Rp.15.676.839.000,-	Revisi Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Belanja Operasional; b. Pencantuman /Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA; c. Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK 	<ul style="list-style-type: none"> a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi, prioritas dan penggunaan anggaran yang terbatas; b. Revisi Halaman III DIPA sesuai realisasi bulan Januari s/d Maret 2023 dan rencana penarikan dana bulan April s/d Desember 2023.
4	Revisi 4	801/PPN.P KL/RC.42 0/V/2023 (Kanwil Semarang)	24/05/2023	06/06/2022	Rp.15.676.839.000,-	Revisi Administrasi	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan	
5	Revisi 5	1071/PPN.PKL/KPA/RC.420/VI I/2023 (Kanwil Semarang)	14/07/2023	14/07/2023	Rp.15.676.839.000,-	Revisi Administrasi	a. Pencantuman/ Perubahan Rencana Penarikan	a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi, prioritas dan

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Pertimbangan
		Nomor	Tanggal					
		Semarang)					Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA; b.Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK	penggunaan anggaran yang terbatas; b. Revisi Halaman III DIPA sesuai realisasi bulan Januari s/d Juni 2023 dan rencana penarikan dana bulan Juli s/d Desember 2023.
6	Revisi 6	Revisi melalui Eselon I		31/07/2023	Rp.15.676.839.000,-	Revisi melalui Eselon I	Revisi buka blokir pergeseran RO ke RAL	
7	Revisi 7	1233/PPN. PKL/KPA/ RC.420/VI II/2023	16/08/2023	21/08/2023	Rp.15.676.839.000,-	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran	a. Perubahan Rencana Kerja (RKA) Satker atas Revisi Anggaran telah ditetapkan dan pangkalan data RKA-K/L pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui ; b. Pengesahan	

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Pertimbangan
		Nomor	Tanggal					
							Revisi Anggaran atas jenis ralat ralat kode akun dalam rangka kebijakan akuntansi (pergeseran antas jenis belanja untuk ralat kode akun dalam rangka kebijakan akuntansi.	
8	Revisi 8	B.3656/PP N.PKL/KP A/RC.420/X/2023	12/10/2023	14/10/2023	Rp.15.676.839.000,-	Revisi Administrasi	<p>a. Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;</p> <p>b. Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK</p>	<p>a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi, prioritas dan penggunaan anggaran yang terbatas</p> <p>b. Revisi Halaman III DIPA sesuai realisasi bulan Januari s/d September 2023 dan rencana</p>

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Tema Revisi	Mekanisme Revisi	Alasan Pertimbangan
		Nomor	Tanggal					
								penarikan dana bulan Oktober s/d Desember 2023
9	Revisi 9	Revisi melalui Eselon I		19/10/2023	Rp.15.090.746.000,-	Revisi melalui Eselon I	Pembukaan blokir Automatic Adjustment untuk diarelokasi ke BA BUN	
10	Revisi 10	Revisi DJA melalui Eselon I		01/11/2023	Rp.15.090.746.000,-	Revisi DJA	Realokasi anggaran dari program WA ke HB (2342.EBA.001 ke 2338.BGA.004)	
11	Revisi 11	Pemuktahiran Data POK 1753/PPN. PKL/KPA/RC.420/XI/2023	30/11/2023	30/11/2023	Rp.15.090.746.000,-	Revisi Administrasi	Pemuktahiran Data POK	Pemuktahiran Data POK
12	Revisi 12	Pemuktahiran Data POK 1943/PPN. PKL/KPA/RC.420/XI/2023	28/12/2023	28/12/2023	Rp.15.090.746.000,-	Revisi Administrasi	Pemuktahiran Data POK	Pemuktahiran Data POK

Perkembangan pagu sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.671.158.000
2.	Program Dukungan Manajemen	11.419.588.000
	TOTAL	15.090.746.000,-

B. Realisasi Penyerapan Anggaran

Dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.15.090.746.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.14.984.629.076,-** atau mencapai 99,30 % pada akhir tahun 2023, secara kinerja PPN Pekalongan mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **115,83 %** dengan penjabarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Tahun)	Target Des	Capaian Des	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pekalongan	IKS.01.1	Penerimaan PNBP di PPN Pekalongan	Rp. Juta	415	415	1.221,33	120
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pekalongan	IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pekalongan	Ton	3.708	3.708	12.736,70	120
3	Pengelolaan PPN Pekalongan yang berdaya saing	IKS.03.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pekalongan	Persen	100	100	100	100
		IKS.03.2	Tingkat Kinerja PPN Pekalongan	Nilai	83	83	89,85	108,25
		IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Persen	50	50	69	120

4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pekalongan yang optimal	IKS.04.1	Persentase pengendalian Pengendalian Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pekalongan	Persen	75	75	80	106,67
		IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Nilai	30,01	30,01	41,39	120
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan	IKS.05.1	Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	50	50	198	120
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pekalongan	IKS.06.1	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Persen	5	5	7	120
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan	IKS.07.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK)	Nilai	75,07	75,07	77,75	103,57
		IKS.07.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pekalongan	Persen	75	75	100	120
		IKS.07.3	Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Pekalongan	Nilai	93	93	98,99	106,44
		IKS.07.4	IP ASN PPN Pekalongan	Indeks	80	80	89,92	112,40
		IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pekalongan	Persen	77,5	77,5	88,75	114,52
		IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pekalongan	Persen	77,5	77,5	100	120
		IKS.07.7	Nilai IKPA PPN Pekalongan	Nilai	89	89	96,15	102,56
		IKS.07.8	Nilai Kinerja Anggaran PPN Pekalongan	Nilai	82	82	85,75	104,57
		IKS.07.9	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Indeks	88,21	88,21	90,05	102,09

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat ada 18 indikator kinerja telah mencapai target bahkan lebih. Secara umum skor kinerja adalah 115,83 yang didukung pencapaian target

indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih oleh 10 (sepuluh) indikator yang memperoleh predikat baik, yaitu:

1. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pekalongan (Persen);
2. Tingkat Kinerja PPN Pekalongan (Nilai);
3. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (Persen);
4. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (Nilai);
5. Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Pekalongan (Nilai);
6. Nilai IKPA PPN Pekalongan (Nilai);
7. Nilai Kinerja Anggaran PPN Pekalongan (Nilai);
8. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (Indeks).

Sedangkan 10 indikator kinerja memperoleh predikat istimewa, yaitu :

1. Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Pekalongan (Rp. Juta);
2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pekalongan (Ton);
3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (Persen);
4. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai);
5. Kapal Perikanan Izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal);
6. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen);
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pekalongan (Persen);
8. IP ASN PPN Pekalongan. (Indeks);
9. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pekalongan (Persen);
10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pekalongan (Persen).

C. Perkembangan Penyerapan Anggaran

Bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan **99,30%**. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi penggunaan anggaran, dimana untuk mencapai target kinerja 100%, tidak perlu menghabiskan seluruh anggaran.

D. Capaian Kinerja Pelabuhan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan PPN Pekalongan diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Pencapaian IKU PPN Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Pekalongan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN IV 2023	% TERHADAP TARGET TRIWULAN IV 2023
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pekalongan	1 Penerimaan PNBP di PPN Pekalongan	415	1.221,33	120
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pekalongan	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pekalongan	3.708	12.736,70	120
3	Pengelolaan PPN Pekalongan yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pekalongan	100	100	100
		4 Tingkat Kinerja PPN Pekalongan	83	89,85	108,25
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	50	69	120
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pekalongan yang optimal	6 Persentase pengendalian Pengendalian Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pekalongan	75	80	106,67
		7 Persentase pengendalian Pengendalian Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pekalongan	30,01	41,39	120
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan	50	198	120

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN IV 2023	% TERHADAP TARGET TRIWULAN IV 2023
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pekalongan	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	5	7	120
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK)	75,07	77,75	103,57
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pekalongan	75	100	120
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Pekalongan	93	98,99	106,44
		13 IP ASN PPN Pekalongan	80	89,92	112,40
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pekalongan	77,5	88,75	114,52
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pekalongan	77,5	100	120
		16 Nilai IKPA PPN Pekalongan	89	96,15	102,56
		17 Nilai Kinerja Anggaran PPN Pekalongan	82	85,75	104,57
		18 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	88,21	90,05	102,09

Dengan tercapainya semua target IKU pada tahun 2023 diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di di tahun berikutnya dipertahankan bahkan ditingkatkan.

BAB IV. KERAGAAN OPERASIONAL

A. Produksi dan Harga Ikan

Volume pendaratan ikan di PPN Pekalongan tahun 2023 sebesar 12.736.685 dengan nilai produksi mencapai Rp. 238.428.655.769,-. Volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yakni sebesar 8,65% dan diikuti dengan penurunan nilai produksi sebesar 3,84% . Rata-rata produksi ikan yang didaratkan setiap harinya sekitar 34,89 ton dengan harga rata-rata mencapai Rp. 18.719,-/kg atau dengan kata lain harga rata-rata meningkat 5,26% dibandingkan tahun yang lalu.

Ikan yang didaratkan kondisinya 81,13% merupakan ikan beku dan 18,87% merupakan ikan segar. Hal tersebut sebagai akibat sudah semakin banyaknya kapal yang menggunakan alat bantu berupa refrigerator untuk menyimpan hasil tangkapan karena trip penangkapan yang cukup panjang. Selain itu, cukup banyak kapal yang beroperasi di WPP-NRI 718, 572 dan 573 yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan sehingga membutuhkan media penyimpanan alat pembeku (*freezer*). Meskipun ikan didaratkan dalam kondisi beku, namun kualitas ikan yang didaratkan tetap bagus, hal ini yang akan mempengaruhi harga ikan yang semakin tinggi pula. Waktu penangkapan dengan menggunakan alat pembeku bisa lebih lama dilaut, sedangkan yang menggunakan es apabila es habis akan segera mendaratkan ikannya.

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Produksi & Nilai Produksi di PPN Pekalongan Tahun 2014-2023

No	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Harga Rata2/Kg (Rp)	Produksi Rata2/hari (Ton)
1	2014	20.790,95	199.907.092	9.615,10	56,96
2	2015	17.597,94	205.211.125	11.661,09	48,21
3	2016	19.684,75	255.219.047	12.965,32	53,93
4	2017	12.847,93	211.834.156	16.487,80	35,20
5	2018	12.815,64	199.088.760	15.534,83	35,11
6	2019	13.490,11	175.902.795	13.039,39	36,96
7	2020	16.157,23	231.676.798	14.338,89	44,27
8	2021	12.653,53	214.657.679	16.964,25	34,67
9	2022	13.943,00	247.948.913	17.783.04	38,20
10	2023	12.736,68	238.427.251	18.719,84	34,89
	R (%)	-0.87%	5.97%	8.29%	-0.87%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi selama 10 tahun mengalami penurunan sebesar 0.87%, namun harga jual ikan menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat dari nilai produksi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5.97%. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kualitas produksi yang didaratkan di PPN Pekalongan setiap tahunnya dan daya beli masyarakat terhadap ikan meningkat.

B. Musim Penangkapan Ikan

Musim penangkapan ikan di PPN Pekalongan dibagi menjadi dua kelompok. Musim paceklik (tidak musim ikan) biasa terjadi di Triwulan kesatu (1) dan ketiga (3) sedangkan di Triwulan kedua (2) dan empat (4) adalah puncak pendaratan ikan. Pengaruh cuaca El Nino yang menyebabkan kondisi basah atau musim hujan yang lebih panjang. Dampak dari curah hujan yang panjang menyebabkan salinitas air laut menjadi menurun di atas 30 ppm. Demikian juga kondisi air laut yang menerima sinar matahari yang lebih lama menyebabkan aktifitas fotosintesa plankton menjadi meningkat yang berpengaruh kepada kesuburan di perairan laut. Meningkatnya kesuburan perairan berpengaruh juga terhadap sumber daya perikanan dengan banyaknya ikan yang bisa ditangkap.

Terjadinya perubahan daerah yang semula di WPP 713 menjadi WPP 718, 572, 573 maka kapal yang melakukan area penangkapan di WPP 718, 572, 573 cenderung mendaratkan ikan di daerah pelabuhan terdekat seperti di PPN Tual atau di Pelabuhan Umum Dobo. Selain di pelabuhan tersebut, ada kecenderungan akan mendaratkan ikan pada pelabuhan pangkalan sesuai dengan izin yang tertera pada SIPI. Dengan adanya izin pelabuhan pangkalan lebih dari satu dan berlaku untuk area penangkapan di WPPNRI, maka ada kecenderungan kapal-kapal yang berdomisili di PPN Pekalongan akan mendaratkan ikan di luar PPN Pekalongan.

Di tahun 2023 jumlah kapal yang mendaratkan khususnya kapal yang berukuran <30 GT mengalami kenaikan 0,41% dan yang >30GT mengalami penurunan 1,83%. Hal ini dikarenakan banyak kapal yang beroperasi di WPP 718 dan 573 yang mengirimkan hasil tangkapan dan pulang tetap membawa ikannya pada trip terakhir. Kapal <30 GT tersebut tidak melakukan operasi penangkapan sepanjang bulan hanya antara sepuluh sampai lima belas hari dalam setiap bulannya (musim petengan/ gelap bulan) mereka beroperasi di Laut Jawa dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Pekalongan. Kapal yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan masih di dominasi oleh kapal >30GT dengan alat tangkap Purse Sein dan Jaring Insang, sedangkan kapal <30 GT didominasi oleh kapal-kapal Bubu, Payang, Jaring Insang Hanyut.

C. Daerah Penangkapan Ikan

Pada tahun 2023 daerah penangkapan kapal perikanan sebagian besar berada di WPP 712 dengan jumlah 96,27%, WPP 713 sebanyak 2,58% dan WPP 573, 572, dan 718 dibawah 1% dari jumlah total trip kapal yang beroperasi sebanyak 4658 kali trip.

Kapal yang beroperasi di WPP 713, 718, 572, 573 lama hari dilaut berkisar 50 hari s/d 180 hari dan didominasi oleh kapal yang berukuran >30 GT dengan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal (*Purse Seine*), sedangkan kapal yang beroperasi di WPP 712 lama hari operasi berkisar 3 hari s/d 15 hari dan dilakukan oleh kapal yang berukuran <30 GT yang didominasi oleh kapal *Purse Seine* dan Jaring Insang Hanyut. Sedangkan kapal yang berukuran <5 GT berasal dari kapal yang menggunakan jaring arad, bubu dan jaring insang dan beroperasi *one day fishing*.

Tabel 9. Perkembangan Daerah Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan Tahun 2023

Bulan	Purse Seine						Gill Net			Alat Tangkap Lainnya					
	WPPNRI					Jumlah	WPPNRI		Jumlah	WPPNRI					Jumlah
	712	713	572	573	718		712	718		712	713	718	572	573	
Januari	2	3		1		6	14	1	15	79	4	3			86
Februari	1	7				8	4		4	244	2				246
Maret	44	7			1	52	33		33	276	2	2			280
April	30	6	2	3	9	50	45		45	141		1			142
Mei	149			1	3	153	78		78	274	5				279
Juni	117			2		119	64		64	171	5				176
Juli	29	2			2	33	109		109	153	4				157
Agustus	22	5		2		29	94		94	205	5				210
September	47	3		1		51	129		129	318	4				422
Oktober	25	2		3		30	127	1	128	232	10	1			243
November	19	16		7		42	132		132	576	10	1		1	587
Desember	40	6		7		51	92		92	350	11	1			362
Total	525	57	2	27	15	624	921	-	923	3012	63	9		1	3091

D. Armada Perikanan

Jumlah kapal yang aktif beroperasi di tahun 2023 sebanyak 420 unit kapal. Terdapat kenaikan jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan sebanyak 10,4% dari tahun 2022. Dari seluruh kapal aktif di tahun 2023 terdiri dari 27,9% kapal *Purse Seine* >30GT, Kapal *Purse Seine* Mini pada kapal <30GT sebanyak 14,19%, kapal-kapal <30 GT didominasi sebanyak 10,9% kapal

tangkap Jaring Insang Hanyut dan 12,47% kapal dengan alat tangkap Bubu, dan sisanya kapal >30 GT dengan alat tangkap Bouke Ami, Jala Jatuh Berkapal dan Jarik Tarik Berkantong, sedangkan kapal <5GT didominasi oleh kapal Payang. Dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah trip dan jumlah kapal yang aktif.

Tabel 10. Perkembangan armada perikanan berdasarkan Alat Tangkap yang digunakan di PPN Pekalongan Tahun 2014 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Total	Pukat Cincin >30 GT	Pukat Cincin <30 GT	Jaring Insang Hanyut	Jaring Insang Lingkar	Payang	Bubu	Lainnya
1	2014	314	116	148	50	0	0	0	0
2	2015	469	198	146	25	0	0	0	0
3	2016	302	133	111	47	0	0	0	11
4	2017	410	84	91	48	23	56	31	77
5	2018	301	74	42	48	25	42	66	4
6	2019	541	196	51	103	20	57	50	64
7	2020	556	131	150	57	18	95	67	38
8	2021	552	205	67	119	17	50	42	52
9	2022	376	90	58	46	19	71	55	37
10	2023	420	130	66	51	20	95	55	44

Bila dilihat dari jumlah trip kedatangan kapal di PPN Pekalongan pada tahun sejumlah 4658 kali trip, hal ini tentu saja mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 26% dengan jumlah mendaratkan ikan sebanyak 4685 kali. Dominasi kapal yang mendaratkan ikan pada tahun 2023 adalah kapal <5GT sebanyak 3671 kali, kemudian kapal 5-10 GT melakukan trip sebanyak 62 kali dan kapal 10-30GT dengan trip sebanyak 742 kali dengan area penangkapan di WPPNRI 712. Sedangkan kapal >30GT dengan jumlah trip sebanyak 163 kali dengan daerah penangkapan ikan di WPPNRI 513, 572, 573 dan 718. Berikut perkembangan jumlah trip kapal bongkar di PPN Pekalongan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan
Tahun 2022 – 2023

No.	Bulan	Jumlah Trip Kapal		Jumlah Kapal Bongkar (Kali)	
		2022	2023	2022	2023
1	Januari	277	107	290	111
2	Februari	391	258	393	263
3	Maret	617	365	619	367
4	April	369	237	393	238
5	Mei	80	510	81	511
6	Juni	131	359	134	362
7	Juli	150	299	152	299
8	Agustus	241	333	245	333
9	September	460	506	462	506
10	Oktober	397	409	423	409
11	November	374	761	396	765
12	Desember	190	514	196	521
Jumlah		3.677	4.658	3.784	4.685

E. Jenis Ikan Hasil Tangkapan

Dari jenis ikan yang didaratkan sebanyak 12,736,687 kg sebesar 96,10% adalah ikan pelagis dan sisanya 3,9% adalah ikan demersal. Jumlah ikan pelagis yang didaratkan di PPN Pekalongan mengalami kenaikan 1% dari tahun 2022, dikarenakan bertambahnya jumlah armada kapal dengan alat tangkap Jala Jatuh Berkapal dan Bouke Ami yang mendaratkan tangkapan utamanya yaitu cumi-cumi di PPN Pekalongan. Dari total ikan yang didaratkan didominasi oleh ikan Layang Deles, ikan Layang Benggol, ikan Lemuru Jawa, ikan Tongkol Abu-abu dan ikan Cakalang serta ikan demersal yang tertangkap umumnya jenis ikan cumi-cumi, bawal hitam, kakap, rajungan dan kuwe.

Ikan pelagis umumnya ditangkap dengan alat tangkap Pukat Cincin, sedangkan ikan pelagis besar sebagian ada yang ditangkap dengan alat tangkap Jaring Insang Lingkar. Adapun Jenis ikan demersal umumnya ditangkap oleh Jaring Insang Tetap Jala Jatuh Berkapal.

Tabel 12. Perkembangan Volume, Nilai dan Harga rata-rata ikan hasil tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2023

No.	Nama Ikan	Volume (Kg)	Nilai Produksi (Kg)	Harga Rata-rata (Kg)
	IKAN PELAGIS			
1	Selar Bentong	273,783.00	5,208,896,090.00	19,025.64
2	Cumi-cumi	408,068.00	26,829,747,000.00	65,748.23
3	Golok-golok	886.00	8,116,000.00	9,160.27
4	Alu-alu	21,692.00	398,572,000.00	18,374.15
5	Pilok	33,274.00	294,778,000.00	8,859.11
6	Kembung Lelaki	984,276.00	23,564,933,690.00	23,941.39
7	Kembung Perempuan	228,711.00	4,065,877,000.00	17,777.36
8	Layang Benggol	2,128,324.00	32,183,188,090.00	15,121.38
9	Layang Deles	2,318,858.00	33,690,885,099.00	14,529.09
10	Layang Anggur	43,848.00	939,139,000.00	21,418.06
11	Layur	15,051.00	221,898,080.00	14,743.08
12	Lemadang	35,260.00	698,188,000.00	19,801.13
13	Siro	1,008,588.00	9,785,252,340.00	9,701.93
14	Selar Komo	17,853.00	383,532,000.00	21,482.78
15	Selar Kuning	119,367.00	626,837,780.00	5,251.35
16	Layaran	2,348.00	48,155,000.00	20,508.94
17	Setuhuk Putih	32.00	704,000.00	22,000.00
18	Ikan Tumbuk	115.00	1,930,000.00	16,782.61
19	Setuhuk Hitam	10,158.00	243,958,000.00	24,016.34
20	Sunglir	10,584.00	213,362,000.00	20,158.92
21	Tembang	452,222.00	2,042,750,000.00	4,517.14
22	Tenggiri	45,175.00	2,868,144,000.00	63,489.63
23	Tenggiri Papan	3,622.00	161,306,000.00	44,535.06
24	Tetengkek	76,201.00	622,998,000.00	8,175.72
25	Tongkol Abu-abu	1,222,701.00	22,756,106,260.00	18,611.34
26	Cakalang	1,698,783.00	35,984,220,000.00	21,182.35
27	Tongkol Komo	557,561.00	8,346,568,840.00	14,969.79
28	Tongkol Krai	66.00	950,000.00	14,393.94
29	Tongkol Lisong	152,360.00	2,622,804,000.00	17,214.52
30	Tuna Mata Besar	341,139.00	8,096,593,500.00	23,734.00
31	Teri	5,843.00	52,212,000.00	8,935.82
32	Talang-talang	19,353.00	138,996,000.00	7,182.14
33	Belanak	56.00	585,000.00	10,446.43
34	Bawal Putih	1.00	100,000.00	100,000.00
35	Selanget	3,334.00	11,598,000.00	3,478.70
	Total	12,239,493.0	223,113,880,769.0	18,229.0

	IKAN DEMERSAL			
1	Bawal hitam	117,082.00	5,151,428,000.00	43,998.46
2	Swanggi	9,016.00	77,060,000.00	8,547.03
3	Cucut Pisang	362.00	4,357,000.00	12,035.91
4	Cucut Lanjaman	19,799.00	423,697,000.00	21,399.92
5	Cucut Tokek	-	-	-
6	Cucut martil	-	-	-
7	Cucut sorah	-	-	-
8	Baronang	58.00	1,560,000.00	26,896.55
9	Kerapu Balong	45,078.00	1,147,289,000.00	25,451.20
10	Ikan Lidah	259.00	2,659,000.00	10,266.41
11	Beloso	3,029.00	23,664,000.00	7,812.48
12	Kakap Merah	33,351.00	2,420,419,000.00	72,574.11
13	Kakap	3,100.00	89,908,000.00	29,002.58
14	Kakap batu	212.00	9,598,000.00	45,273.58
15	Jenaha	1,105.00	37,729,000.00	34,143.89
16	Kerong-kerong	491.00	1,457,000.00	2,967.41
17	Kwe	17,448.00	429,871,000.00	24,637.27
18	Manyung	61,264.00	1,648,969,000.00	26,915.79
19	Sokang	665.00	1,046,000.00	1,572.93
20	Pari Kembang	6,971.44	105,951,000.00	15,197.87
21	Pari Kekeh	4,423.00	89,262,000.00	20,181.32
22	Sembilang	1,500.00	23,096,000.00	15,397.33
23	Peperek	22,738.00	101,323,000.00	4,456.11
24	Ikan Sebelah	5,907.00	184,109,000.00	31,167.94
25	Remang	957.00	22,698,000.00	23,717.87
26	Gabus	4,268.00	80,528,000.00	18,867.85
27	Tigawaja	3,070.00	40,940,000.00	13,335.50
28	Ayam-ayam	7,752.00	292,397,000.00	37,718.91
29	Kuniran	11,899.00	87,460,000.00	7,350.20
30	Kurisi	10,667.00	54,087,000.00	5,070.50
31	Kaka Tua	-	-	-
32	Sotong	3,223.00	109,331,000.00	33,922.12
33	Kuro	1,882.00	48,560,000.00	25,802.34
34	Japuh	47,524.00	293,835,000.00	6,182.88
35	Julung-Julung	660.00	5,479,000.00	8,301.52
36	Udang Dogol	13,327.58	489,882,000.00	36,757.00
37	Udang jerbung	1,924.00	177,773,000.00	92,397.61
38	Udang Krosok	8,391.00	107,138,000.00	12,768.20
39	Udang Rebon	-	-	-
40	Rajungan	20,369.00	1,414,085,000.00	69,423.39

41	Kepiting	771.00	33,611,000.00	43,594.03
42	Kerang Darah	2,760.00	22,514,000.00	8,157.25
43	Ekor Kuning	-	-	-
44	Teripang	3,891.00	58,601,000.00	15,060.65
	Total	497,194.02	15,313,371,000.00	30,799.59
	Sub Total	12,736,687.02	238,427,251,769.00	18,719.72

F. Pemasaran dan Distribusi Ikan

Pada tahun 2023, sebanyak 91,24% dari total ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan merupakan ikan beku dan 8,76% berupa ikan segar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu ikan yang didaratkan dan dipasarkan dalam bentuk ikan segar mengalami penurunan dari 12,81%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah armada kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan merupakan kapal-kapal diatas 30 GT yang melakukan penangkapan long trip atau dilaut lebih dari 3 bulan dengan Daerah Penangkapan Ikan di luar WPPNRI 712 sehingga membutuhkan bantuan freezer untuk menyimpan ikan agar kualitas ikan bagus sampai pendaratan ikan.

Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan dipasarkan dan didistribusikan lokal dalam kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar kota antar provinsi. Dari total hasil tangkapan, sebanyak 31,15% dipasarkan lokal dalam daerah yaitu kota dan kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Sementara 68,85% dipasarkan antar kota maupun antar provinsi, diantaranya Bandung, Jakarta, dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Adapun daerah tujuan pemasaran produk hasil tangkapan ikan PPN Pekalongan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 13. Daerah Tujuan Pemasaran Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan Tahun 2023

NO.	JENIS IKAN	KONDISI IKAN	LOKAL			
			TUJUAN/LOKASI	VOLUME (KG)	NILAI (Rp)	HARGA RATA2/KG (Rp)
1	Alu-Alu	Beku	Kota Bandung	20.308	363.483.179	17.899
2	Aruan Tasek; Kobia	Beku	Kota Pekalongan	3.193	59.570.737	18.657
3	Bandeng	Segar	Kota Pekalongan	62	1.058.216	17.068
4	Baronang	Segar	Kota Pekalongan	165	3.283.968	19.903
5	Bawal Hitam	Beku	Jakarta Utara	107.019	4.735.961.200	44.253
6	Bawal Jenggot	Beku	Jakarta Utara	254	6.858.000	27.000
7	Bawal Putih	Segar	Kota Pekalongan	1	50.000	50.000
8	Belanak	Segar	Kota Pekalongan	112	1.580.256	14.109
9	Beloso	Segar	Kota Pekalongan	3.459	26.974.540	7.798

10	Biji Nangka	Segar	Kab. Batang	2.950	13.570.000	4.600
11	Bulan-bulan	Beku	Kota Pekalongan	60	279.600	4.660
12	Cakalang [SKJ]	Beku	Kab. Banyuwangi	999.459	19.686.454.974	19.697
13	Coklatan	Segar	Kota Pekalongan	3.603	23.019.567	6.389
14	Cucut Lanjam	Beku	Kab. Pemalang	13.133	217.111.004	16.532
15	Cumi-cumi	Beku	Kota Bandung	146.885	6.185.162.104	42.109
16	Gerot-Gerot	Beku	Kota Pekalongan	166	1.212.099	7.302
17	Gindara	Beku	Jakarta Utara	8	152.000	19.000
18	Golok-Golok	Beku	Jakarta Utara	832	6.552.485	7.876
19	Gurita	Segar	Kota Pekalongan	4	100.000	25.000
20	Hiu Pilus	Beku	Kab. Pemalang	1.205	13.323.827	11.057
21	Hiu Tokek	Segar	Kota Pekalongan	79	683.713	8.655
22	Ikan Ayam-Ayam	Beku	Jakarta Utara	511	13.747.178	26.903
23	Ikan Jacket	Segar	Jakarta Utara	5.189	153.099.715	29.505
24	Ikan Layaran [SFA]	Segar	Kab. Pemalang	1.928	37.585.901	19.495
25	Ikan Lidah	Segar	Kota Pekalongan	258	2.656.196	10.295
26	Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI]	Segar	Kota Pekalongan	2.276	50.048.412	21.990
27	Ikan Tumbuk [SSP]	Segar	Kab. Pemalang	67	1.641.098	24.494
28	Japuh	Segar	Kota Pekalongan	47.845	302.717.593	6.327
29	Julung-Julung [HHF]	Beku	Jakarta Utara	393	4.057.403	10.324
30	Kaci-kaci	Beku	Kota Pekalongan	25	550.000	22.000
31	Kaci-Kaci ; Kakap Balong [PFV]	Beku	Jakarta Utara	29.071	556.922.837	19.157
32	Kakap	Segar	Kota Pekalongan	1.778	46.608.048	26.214
33	Kakap Batu	Segar	Kota Pekalongan	65	1.338.558	20.593
34	Kakap Hitam	Beku	Jakarta Utara	90	2.700.000	30.000
35	Kakap Jenaha	Beku	Kota Pekalongan	1.509	50.485.694	33.456
36	Kakap Merah	Beku	Kota Pekalongan	31.151	1.494.957.257	47.991
37	Kakap Sejati	Segar	Kota Pekalongan	833	50.975.435	61.195
38	Kambing-Kambing	Beku	Kota Pekalongan	256	4.843.776	18.921
39	Kapas-Kapas [GEF]	Segar	Kab. Pekalongan	17	149.951	8.821
40	Kembung Lelaki	Beku	Jakarta Utara	799.152	16.146.100.306	20.204
41	Kembung Perempuan [RAB]	Segar	Kota Pekalongan	220.466	4.102.284.351	18.607
42	Kepiting Bakau	Segar	Kota Pekalongan	771	33.418.288	43.344
43	Kerang Darah	Segar	Kota Pekalongan	345	2.642.700	7.660
44	Kerapu Balong	Beku	Kota Pekalongan	2.407	61.470.417	25.538
45	Kerapu Balong Coklat Kemerahan	Segar	Kota Pekalongan	31	724.997	23.387

46	Kerapu Lumpur; Babunyai; Kerapu; Babunjai	Beku	Kota Pekalongan	219	3.302.564	15.080
47	Kerong-Kerong [TJB]	Segar	Kota Pekalongan	817	2.893.294	3.541
48	Ketang-Ketang	Segar	Kota Pekalongan	53	285.710	5.391
49	Keting	Segar	Kota Pekalongan	26	156.000	6.000
50	Kuniran	Segar	Kota Pekalongan	7.847	55.804.333	7.112
51	Kurau; Kuro [FOT]	Segar	Kota Pekalongan	1.497	39.291.260	26.247
52	Kurisi	Segar	Kab. Batang	6.036	33.823.330	5.604
53	Kuro ; Senangin ; Kurau [QHX]	Segar	Kota Pekalongan	329	8.142.531	24.749
54	Kwe Selar	Segar	Kota Pekalongan	524	10.187.608	19.442
55	Kwee	Beku	Jakarta Utara	9.635	233.680.620	24.253
56	Layang Anggur	Beku	Jakarta Utara	5.557	61.196.463	11.013
57	Layang Benggol	Beku	Jakarta Utara	2.292.525	29.113.691.985	12.699
58	Layang Deles	Beku	Kab. Batang	1.989.087	31.945.621.259	16.060
59	Layang [Lajeng]	Beku	Kab. Banyuwangi	133.873	2.584.730.635	19.307
60	Layur [SVH]	Beku	Kota Bandung	7.291	69.965.762	9.596
61	Lemadang	Beku	Kota Bandung	16.093	327.838.973	20.372
62	Lencam	Segar	Kota Pekalongan	92	2.044.455	22.222
63	Manyung , Jahan [AUX]	Beku	Kab. Pemalang	1.428	21.110.660	14.783
64	Manyung [AUT]	Beku	Kab. Pemalang	39.301	989.450.164	25.176
65	Pari Burung	Beku	Jakarta Utara	2	35.000	17.500
66	Pari Kekeh	Beku	Kota Cirebon	3.758	80.517.781	21.426
67	Pari Kelapa	Beku	Kab. Pemalang	92	1.427.919	15.521
68	Pari Kembang; Pare Kembang	Beku	Jakarta Utara	6.004	91.475.443	15.236
69	Pasir-pasir [NSC]	Segar	Kab. Batang	1.680	4.200.000	2.500
70	Peperek	Segar	Kab. Batang	16.754	101.079.796	6.033
71	Pilok	Beku	Kab. Batang	32.181	330.186.854	10.260
72	Pisang-pisang , Ekor Kuning [TED]	Beku	Jakarta Utara	42	1.260.000	30.000
73	Pisang-Pisang Merah [TEC]	Beku	Kota Pekalongan	108	820.206	7.595
74	Rajungan [SCD]	Segar	Kab. Pemalang	20.281	1.336.916.760	65.920
75	Remang	Segar	Kota Cirebon	754	16.227.023	21.521
76	Selanget	Segar	Kota Pekalongan	2.934	11.534.206	3.931
77	Selar Bentong	Beku	Kota Bandung	246.380	4.596.583.114	18.656
78	Selar Komo	Beku	Jakarta Utara	16.711	363.911.515	21.777
79	Selar Kuning	Beku	Jakarta Utara	124.697	902.644.174	7.239
80	Sembilang	Segar	Kota Pekalongan	1.346	21.004.779	15.605
81	Setuhuk Hitam [BLM]	Beku	Kab. Batang	3.612	89.809.972	24.864

82	Simping	Segar	Kota Pekalongan	2.424	24.507.549	10.110
83	Siro [AGS]	Segar	Kota Pekalongan	32.597	286.755.809	8.797
84	Slengseng	Beku	Jakarta Utara	1.228	25.076.579	20.421
85	Sokang	Segar	Kota Pekalongan	2.489	5.779.181	2.322
86	Sotong	Segar	Kota Pekalongan	2.490	83.999.320	33.735
87	Sunglir	Beku	Kota Bandung	6.962	150.451.141	21.610
88	Swanggi	Beku	Kab. Batang	7.822	56.553.883	7.230
89	Talang-Talang	Beku	Kab. Pekalongan	19.212	123.510.289	6.429
90	Tembang	Segar	Kota Pekalongan	438.668	2.645.247.798	6.030
91	Tenggiri Papan [GUT]	Segar	Kota Pekalongan	3.827	168.534.433	44.038
92	Tenggiri [COM]	Beku	Jakarta Utara	17.079	980.914.510	57.434
93	Teri	Beku	Kota Pekalongan	4.434	37.119.601	8.372
94	Teripang	Segar	Kab. Cirebon	3.913	57.693.761	14.744
95	Tetengek	Beku	Kab. Cilacap	70.707	538.605.961	7.617
96	Tigawaja	Segar	Kab. Pekalongan	2.944	35.810.571	12.164
97	Tongkol Abu-Abu [LOT]	Beku	Jakarta Utara	1.131.559	25.431.444.137	22.475
98	Tongkol Banyar [KAW]	Beku	Kota Bandung	469.867	7.703.704.399	16.396
99	Tongkol Pisang-Balaki [FRI]	Beku	Jakarta Utara	86	1.624.970	18.895
100	Tongkol Pisang-Cerutu [BLT]	Beku	Kab. Batang	73.016	1.335.034.975	18.284
101	Tuna Mata Besar [BET]	Beku	Jakarta Utara	135.277	3.273.892.788	24.201
102	Udang Dogol	Segar	Kab. Pemalang	13.308	493.907.567	37.114
103	Udang Jerbung	Segar	Kab. Pemalang	1.904	174.668.517	91.738
104	Udang Krosok	Segar	Kota Pekalongan	8.389	115.622.791	13.783

G. Nelayan

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan jumlah nelayan di sekitar PPN Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 1411 orang, sedangkan anak buah kapal (ABK) yang mengikuti kegiatan penangkapan pada kapal-kapal sebanyak 6319. Jumlah nelayan dan ABK yang aktif pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022, hal ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah armada kapal yang beroperasi di PPN Pekalongan pada tahun 2023, dimana kenaikan terjadi pada kapal-kapal diatas 30GT dan melakukan trip yang panjang.

Nelayan yang melakukan kegiatan di PPN Pekalongan selain dari Kota Pekalongan, serta daerah Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang sebagai kru kapal ≥ 30 GT. Terdapat pula nelayan yang berasal dari Rembang, Demak, Pemalang dan Tegal serta dari Tuban (Jawa Timur). Umumnya mereka menggunakan kapal Mini

Purse Seine (≤ 30 GT) yang dioperasikan saat bulan gelap dan musim angin Barat. Hal ini memberikan dampak yang cukup baik pada masyarakat sekitar PPN Pekalongan khususnya dan Kota Pekalongan pada umumnya terutama dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah nelayan di PPN Pekalongan Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Perkembangan jumlah tenaga kerja di PPN Pekalongan Tahun 2014- 2023

No.	Tahun	Jumlah	Nelayan	Pedagang/Pengolah	Pekerja Lainnya
	<i>Years</i>	<i>Total</i>	<i>Fishermen</i>	<i>Fish Traders/Processors</i>	<i>Workers</i>
1	2014	10.207	7.595	297	2.315
2	2015	11.000	8.240	357	2.403
3	2016	9.859	7.212	229	2.418
4	2017	8.334	5.776	203	2.355
5	2018	7.304	4.763	201	2.340
6	2019	13.422	10.759	223	2.440
7	2020	14.044	11.437	232	2.375
8	2021	13.147	10.705	227	2.215
9	2022	9.892	7.626	145	2.121
10	2023	10.738	7.730	168	2.840
	R (%)	3,93%	6,33%	-3,94%	2,86%

H. Inspeksi Pengendalian Mutu

Tahapan paling penting dari kegiatan penangkapan ikan adalah penanganan ikan setelah proses penangkapan dan saat pembongkaran hasil tangkapan. Tahapan tersebut, merupakan proses penanganan pada titik kritis dalam hal menjaga mutu hasil tangkapan sampai dengan proses hasil tangkapan didistribusikan agar mutu ikan selalu baik. Hal tersebut, merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. Perkembangan pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu di PPN Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Perkembangan Kegiatan Inspeksi Pengendalian Mutu Tahun 2023

No.	Bulan	Purse Seine (PCPK)	JIH	Angkut	Jumlah Kapal Inspeksi	Jumlah Kapal Bongkar	Persentase Realisasi
1.	Jan	5	2	3	10	29	34 %
2.	Feb	4	0	4	8	15	53 %
3.	Mar	27	2	3	32	90	36 %
4.	Apr	40	3	0	43	96	45 %
5.	Mei	95	1	1	97	237	41 %
6.	Jun	71	1	2	74	189	39 %
7.	Jul	21	2	4	27	148	18 %
8.	Agst	20	0	1	21	129	16 %
9.	Sept	34	1	6	41	194	21 %
10.	Okt	42	0	5	47	134	35 %
11.	Nov	42	0	8	50	184	27 %
12.	Des	37	0	8	45	163	28 %
Jumlah Total		438	12	45	495	1.608	31 %

I. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

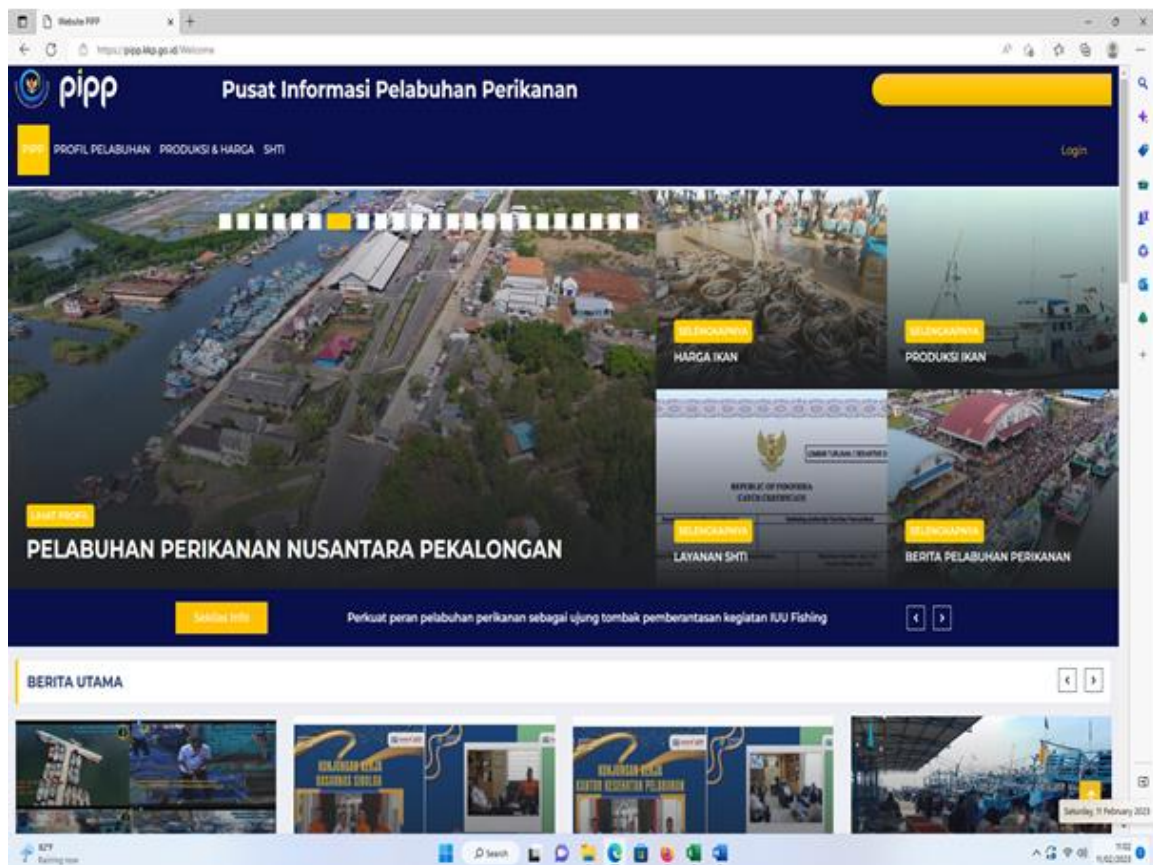
Pelaksanaan PIPP di PPN Pekalongan Tahun 2022 dilaksanakan secara harian, bulanan, dan situasional sesuai dengan format yang ada dalam Sistem Aplikasi PIPP itu sendiri. Pelaporan dilakukan dengan entry harian menggunakan fasilitas jaringan internet melalui sistem Aplikasi PIPP online (pipp.kkp.go.id). Laporan harian dievaluasi secara bulanan oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk sementara data produksi harian diinput melalui aplikasi Input Data Produksi yang juga tergabung dalam Aplikasi DSS.

Pelaksanaan PIPP di PPN Pekalongan sebagai bentuk Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PT No.20/KEP-DJPT/2015 pengganti SK. No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008 dengan 27 (dua puluh delapan) jenis kriteria penilaian yang pada tahun 2015 dengan 11 kriteria penilaian, sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan secara online. Perkembangan hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Perkembangan Evaluasi kinerja UPT PPN Pekalongan Tahun 2023

No.	Bulan	Nilai	Kategori
1.	Januari	86,75	Sangat Baik
2.	Februari	82,75	Baik
3.	Maret	90,75	Sangat Baik
4.	April	92,25	Sangat Baik
5.	Mei	91,75	Sangat Baik
6.	Juni	91,75	Sangat Baik
7.	Juli	89,75	Sangat Baik
8.	Agustus	89,75	Sangat Baik
9.	September	86,75	Sangat Baik
10.	Oktober	92,00	Sangat Baik
11.	November	91,00	Sangat Baik
12.	Desember	93,00	Sangat Baik

Gambar 3. Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)



Secara umum pelaksanaan PIPP termasuk kedalam kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata nilai evaluasi kinerja **89,85**. Adapun kendala teknis yang ditemui dalam *mengentry* data produksi adalah sulitnya operator/petugas input data produksi mengakses dan *mengentry* data produksi harian. Sehingga, meskipun dilakukan secara *online* namun membutuhkan waktu yang lama, dan mencoba secara berulang agar data dapat diinput dengan benar. Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan *maintenance* sistem aplikasi secara global sehingga aplikasi DSS dapat saling terhubung dengan kewenangan dan kebutuhan datanya masing-masing, dapat diakses, diinput dan digunakan hasilnya untuk pelaporan.

J. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Operasional SHTI dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. SHTI merupakan Dokumen yang menyatakan bahwa hasil perikanan tangkap yang diekspor bukan berasal dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. SHTI diwajibkan terhadap seluruh produk perikanan hasil tangkapan dari kapal berbendera Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap hasil perikanan dari kegiatan budidaya, produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, *scallops*, *oyster*. Selama Tahun 2023, PPN Pekalongan telah menerbitkan Lembar Awal Form A sejumlah 284 Lembar yakni sejumlah 91 Lembar dengan rincian 29 SHTI Lembar Turunan dan 62 SHTI Lembar Turunan yang Disederhanakan. Perkembangan jumlah SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Perkembangan Pelayanan SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2023.

No	Bulan	Lembar SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)					
		Jumlah LA	Volume Ikan (Ton)	Jumlah LT	Volume Ikan (Ton)	Jumlah LTS	Volume Ikan (Ton)
1.	Jan	8	-	-	-	4	-
2.	Feb	21	-	-	-	6	-
3.	Mar	32	-	-	-	8	-
4.	Apr	47	-	-	-	2	-
5.	Mei	26	-	-	-	4	-
6.	Jun	18	-	-	-	6	-
7.	Jul	20	-	-	-	7	-

8.	Agst	10	-	-	-	9	-
9.	Sept	7	-	5	-	5	-
10.	Okt	33	-	10	-	7	-
11.	Nov	31	-	7	-	2	-
12.	Des	31	-	7	-	2	-
TOTAL		284	-	29	-	62	-

K. *Logbook* Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Logbook* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, bahwa setiap kapal perikanan yang memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan serta melakukan operasi penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan *Logbook* Penangkapan Ikan yang merupakan tanggung jawab Nakhoda. Adapun penerapan *Logbook* Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan dilaksanakan melalui *Logbook* Penangkapan Ikan secara manual dan Aplikasi *E-Logbook* Penangkapan Ikan.

Pengisian data *Logbook* Penangkapan Ikan merupakan kewajiban Nakhoda kapal penangkap ikan pada saat pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan. Nakhoda wajib menyampaikan data *Logbook* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat pelaporan kedatangan kapal perikanan, sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan. Adapun data *Logbook* Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan diverifikasi di PPN Pekalongan selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Perkembangan Jumlah *Logbook* di PPN Pekalongan Tahun 2023.

No.	Bulan	Kapal PS < 30 GT	Kapal PS > 30 GT	Jumlah
1.	Jan	5	3	8
2.	Feb	2	7	9
3.	Mar	26	9	35
4.	Apr	26	17	43
5.	Mei	35	8	43
6.	Jun	42	2	44

7.	Jul	39	6	45
8.	Agst	23	-	23
9.	Sept	28	2	30
10.	Okt	33	5	38
11.	Nov	31	23	54
12.	Des	33	14	47
Jumlah		323	96	419

L. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

Sebagai langkah pencegahan terhadap praktik kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab atau *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)*, maka diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan operasional perikanan tangkap telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku, serta telah memenuhi aspek keselamatan meliputi aspek kelaiklautan, aspek kelaiktangkapan, dan aspek kelaiksimpanan, yang selanjutnya dibuktikan dalam bentuk Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di PPN Pekalongan baru dimulai pada Bulan Juni Tahun 2022 pasca adanya peralihan kewenangan yang semula pada Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, bahwa Kepala Pelabuhan Perikanan memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan bagi kapal perikanan yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Gubernur (Ijin Daerah). Guna menunjang tugas dan kewenangan tersebut, pada tahun 2023, di PPN Pekalongan terdapat 9 (sembilan) orang Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Adapun Data Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang telah diterbitkan oleh Kepala PPN Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Data Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Periode Tahun 2023.

No.	Bulan	Reguler	SE	Suket	Total
1.	Jan	35	121	4	160
2.	Feb	54	257	4	315
3.	Mar	23	191	0	214
4.	Apr	15	146	0	161

5.	Mei	8	228	0	236
6.	Jun	16	114	2	132
7.	Jul	18	256	2	276
8.	Agst	8	0	2	10
9.	Sept	21	0	0	21
10.	Okt	251	0	0	251
11.	Nov	2	0	0	2
12.	Des	5	0	0	5
Jumlah		456	1313	14	1783

M. Operasional Kesyahbandaran

Pelaksanaan kegiatan Kesyahbandaran pada Pos Terpadu PPN Pekalongan selama periode Tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Adapun uraian tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Mengatur kedatangan kapal perikanan;
2. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
3. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan;
4. Mengatur keberangkatan kapal perikanan;
5. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
6. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
7. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
8. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
9. Memeriksa log book penangkapan ikan;
10. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
11. Mengawasi pemanduan;
12. Mengawasi pengisian bahan bakar;
13. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
14. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
15. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan;

16. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
17. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan
18. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Adapun jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan oleh Syahbandar di PPN Pekalongan selama periode Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar di PPN Pekalongan Tahun 2023

No.	Bulan	Kapal PS < 30 GT	Kapal PS > 30 GT	Jumlah
1.	Jan	28	10	38
2.	Feb	24	29	53
3.	Mar	88	35	123
4.	Apr	63	12	75
5.	Mei	71	43	114
6.	Jun	50	25	75
7.	Jul	46	26	72
8.	Agst	58	31	89
9.	Sept	43	33	76
10.	Okt	56	27	83
11.	Nov	70	17	87
12.	Des	43	23	66
Jumlah		640	311	951

BAB V. KERAGAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PELABUHAN

Kegiatan Pengembangan PPN Pekalongan dilaksanakan melalui kegiatan non fisik dan fisik. Kegiatan Non Fisik adalah kegiatan pelabuhan yang bersifat administrasi, pembinaan mental, pembinaan spiritual maupun yang bersifat kemasyarakatan. Sedangkan Kegiatan Fisik adalah kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang bersifat penambahan aset maupun menambah nilai aset yang sudah ada.

A. Kegiatan Non Fisik

1. Persuratan dan Kearsipan

Disamping kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, dari sisi administrasi, berupa kegiatan surat menyurat juga dapat menggambarkan hubungan kerja antar lembaga. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi E-LAYAR dan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perkembangan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan Tahun 2023 tercatat sebanyak 5.745 surat masuk dan 4.067 surat keluar. Perkembangan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan TA.2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Surat Masuk dan Keluar di PPN Pekalongan Tahun 2023

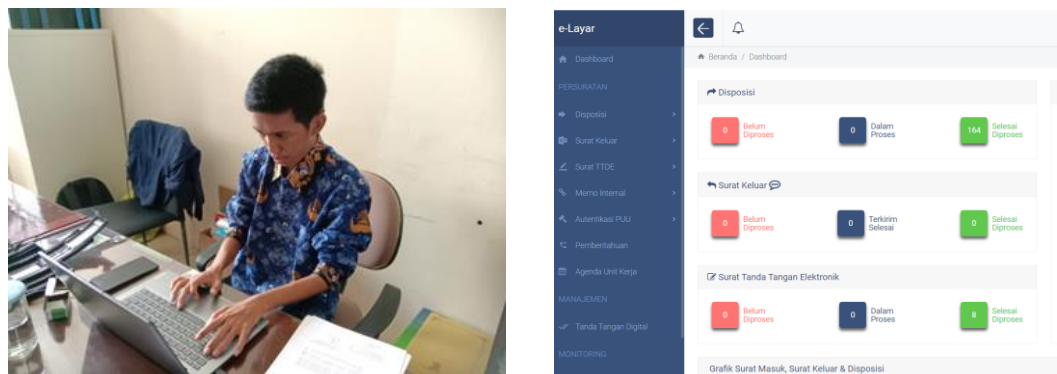
No.	BULAN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Januari	301	475
2	Februari	370	520
3	Maret	304	381
4	April	206	276
5	Mei	389	486
6	Juni	283	365
7	Juli	343	482
8	Agustus	113	267
9	September	99	158
10	Oktober	101	259
11	November	92	182
12	Desember	97	216
JUMLAH		5.745	4.067

Kegiatan pengelolaan persuratan sangat berkaitan dengan pengelolaan kearsipan. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan arsip inaktif yang disimpan di ruang penyimpanan arsip, perlu dilakukan kegiatan penyusutan dan pemusnahan arsip dengan jangka waktu tertentu. Pelaksanaan tersebut, dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tahap penyusutan dan pemusnahan arsip dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

- a) Pembuatan daftar pertelaahan arsip (DPA);
- b) Pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan;
- c) Penyerahan arsip;
- d) Pemusnahan arsip.

Pelaksanaan penyusutan arsip bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas yang masa retensinya sudah habis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan/prosedur administratif yang berlaku. Untuk tahun 2023, PPN Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip.

Gambar 4. Kegiatan Pengelolaan Persuratan



2. Kunjungan Tamu

Pemberian Pelayanan Prima merupakan kewajiban pegawai instansi pemerintah, khususnya dalam penerimaan tamu dalam berbagai keperluan terhadap instansi tersebut. Dengan adanya kunjungan tamu, maka akan terjadi adanya saling tukar menukar informasi mengenai perkembangan instansi asal tamu dan instansi yang dikunjungi. Pada

tahun 2023, jumlah tamu yang berkunjung sebanyak 178 instansi dan 454 orang yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Jumlah Tamu yang berkunjung ke PPN Pekalongan Tahun 2023

No	Bulan	Dinas/ Instansi Terkait		Survey/ Penelitian		Study Banding/ Magang		Praktek Kerja Lapangan	
		Jml Instsi	Jml Org	Jml Instsi	Jml Org	Jml Instsi	Jml Org	Jml Instsi	Jml Org
1	Januari	3	7	2	7	1	4	2	10
2	Februari	2	5	-	-	1	3	1	3
3	Maret	15	32	3	8	1	4	1	5
4	April	5	10	-	-	2	5	-	-
5	Mei	9	24	1	4	3	12	2	15
6	Juni	7	11	2	2	3	6	1	3
7	Juli	10	17	1	1	5	12	2	7
8	Agustus	6	9	-	-	1	5	1	3
9	September	8	24	3	5	4	7	1	4
10	Oktober	15	29	3	5	1	2	-	-
11	November	11	27	5	7	3	15	2	8
12	Desember	16	36	4	7	5	27	4	17
JUMLAH		107	231	24	46	30	102	17	75

3. Wisata Bahari

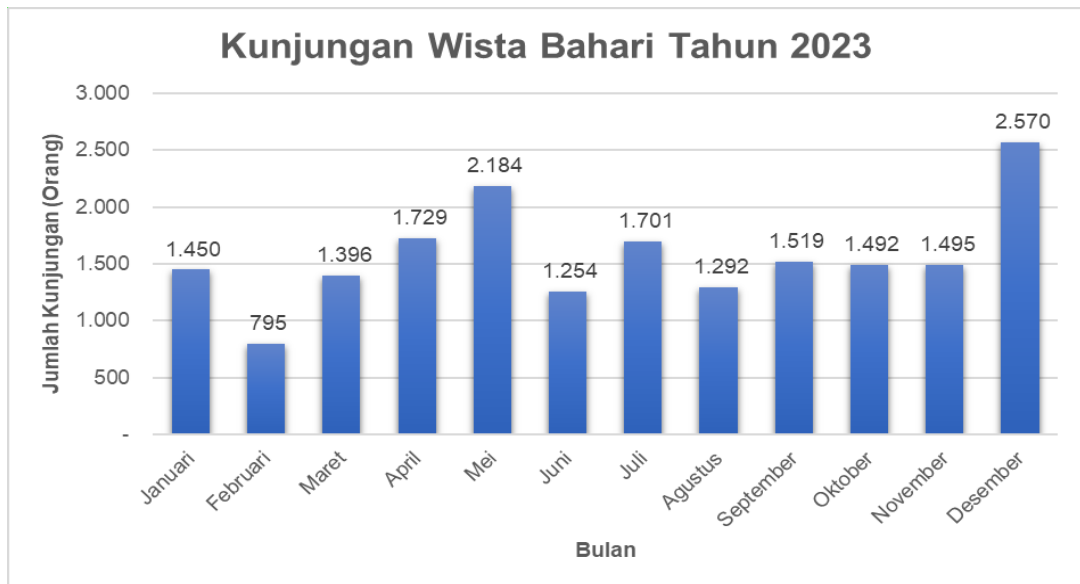
Wisata Bahari PPN Pekalongan atau yang lebih dikenal “Wisata Bahari PPNP” mulai aktif sejak didirikan pada tanggal 12 Juli 2006. Tujuan berdirinya Wisata Bahari adalah sebagai tempat wahana edukasi kebaharian mengenalkan kegiatan operasional perikanan serta memperkenalkan jenis ikan air laut dan tawar.

PPN Pekalongan sebagai pihak pengelola dari Wisata Bahari berusaha untuk mengaktifkan dan memajukan dengan berbagai cara diantaranya melalui :

1. Kegiatan sosialisasi, publikasi dan promosi berupa pembuatan stiker, *leaflet*, pin berlogo wisata bahari, sosial media, website, publikasi radio;
2. Study banding pengelolaan wisata;
3. Bekerja sama dengan Instansi terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Diklat, dan Komunitas menyelenggarakan acara di Wisata Bahari;
4. Penambahan spesies ikan, wall paper jenis ikan dan foto–foto jenis ikan;
5. Pemeliharaan wahana serta permainan anak.

Keberadaan wisata bahari sangat membantu masyarakat dalam hal menambah pengetahuan kebaharian. Pada tahun 2023, sebanyak 18.877 orang mengunjungi Wisata Bahari PPN Pekalongan yang bisa dijabarkan dengan grafik berikut:

Gambar 5. Grafik Jumlah Kunjungan Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2023



Tabel 23. Jumlah Kunjungan Bulanan Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	Januari	1.450
2	Februari	795
3	Maret	1.396
4	April	1.729
5	Mei	2.184
6	Juni	1.254
7	Juli	1.701
8	Agustus	1.292
9	September	1.519
10	Oktober	1.492
11	November	1.495
12	Desember	2.570
Total		18.877

Perkembangan fasilitas Wisata Bahari PPN Pekalongan sampai dengan Tahun 2023 telah memiliki Aquarium, Wahana Edukasi Air, Gardu Pandang (Jetty), dan Arena Bermain Anak-anak. Khusus fasilitas Arena Bermain Anak-anak, telah berkembang dengan berbagai jenis permainan sebagai berikut :

- 1) Ayunan kecil;
- 2) Ayunan besar;
- 3) Kursi ayun;
- 4) Jungkat jungkit;
- 5) Mini *outbond*;
- 6) Globe;
- 7) Kursi putar;
- 8) Jembatan lorong
- 9) Prosotan;
- 10) Tangga Titian

Selain itu, beberapa fasilitas lain di Wisata Bahari PPN Pekalongan pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Lampu Ornament ikan;
- 2) Mushola dan toilet;
- 3) Pusat informasi pengunjung;
- 4) Icon Wisata Bahari;
- 5) SWRO (Sea Water Reverse Osmosis);
- 6) Studio Mini;
- 7) Gedung pertemuan;
- 8) Miniatur alat penangkap ikan;
- 9) Kantin;
- 10) Tempat parkir mobil dan motor;

Gambar 6. Wisata Bahari PPN Pekalongan



4. Pengelolaan Kehumasan

Pengelolaan Kehumasan meliputi: Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan PPN Pekalongan, Publikasi melalui Media Sosial dan Media Lainnya, Pengelolaan Website, Pendampingan Pimpinan dalam Pertemuan/Rapat, serta Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop Kehumasan.

Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan PPN Pekalongan terdiri atas pengelolaan dokumentasi foto dan video. Adapun kegiatan yang didokumentasikan meliputi kegiatan rutin seperti: apel pagi, rapat pimpinan, rapat internal, pembongkaran ikan, kegiatan K5 di PPN Pekalongan; dan kegiatan tertentu, misalnya: kunjungan pejabat/UPT lain, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang sifatnya insidental. Selanjutnya, kegiatan tersebut juga dipublikasikan melalui beberapa media, yaitu: media sosial, website, dan media cetak lainnya (spanduk/banner).

Saat ini, PPN Pekalongan memiliki 4 (empat) media sosial sebagai sarana publikasi informasi yaitu:

- 1) Instagram, dengan nama akun: ppn_pekalongan
- 2) Facebook, dengan nama akun: PPN Pekalongan
- 3) Twitter, dengan nama akun: @PPNpekalongan
- 4) Youtube, dengan nama akun: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Terkait dengan pengelolaan *website* PPN Pekalongan, admin *website* PPN Pekalongan merupakan user dengan level admin terbatas pada pembuatan *content* dan *approval* di website UPT saja. Alamat website PPN Pekalongan adalah: www.kkp.go.id/djpt/ppnpekalongan. Pada dasarnya, tampilan pada *display website* UPT terdiri dari menu dan fitur. Adapun menu dan fitur tersebut bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

Pembaharuan (*Updating*) informasi di website PPN Pekalongan tidak dilakukan secara rutin tapi secara opsional. Artinya, tidak seperti informasi yang disajikan pada media sosial yang bisa dipublikasikan setiap hari, hanya beberapa informasi yang sekiranya layak, dipublikasikan melalui website, biasanya dalam bentuk berita. Pada tahun 2023, *updating* dilakukan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut.

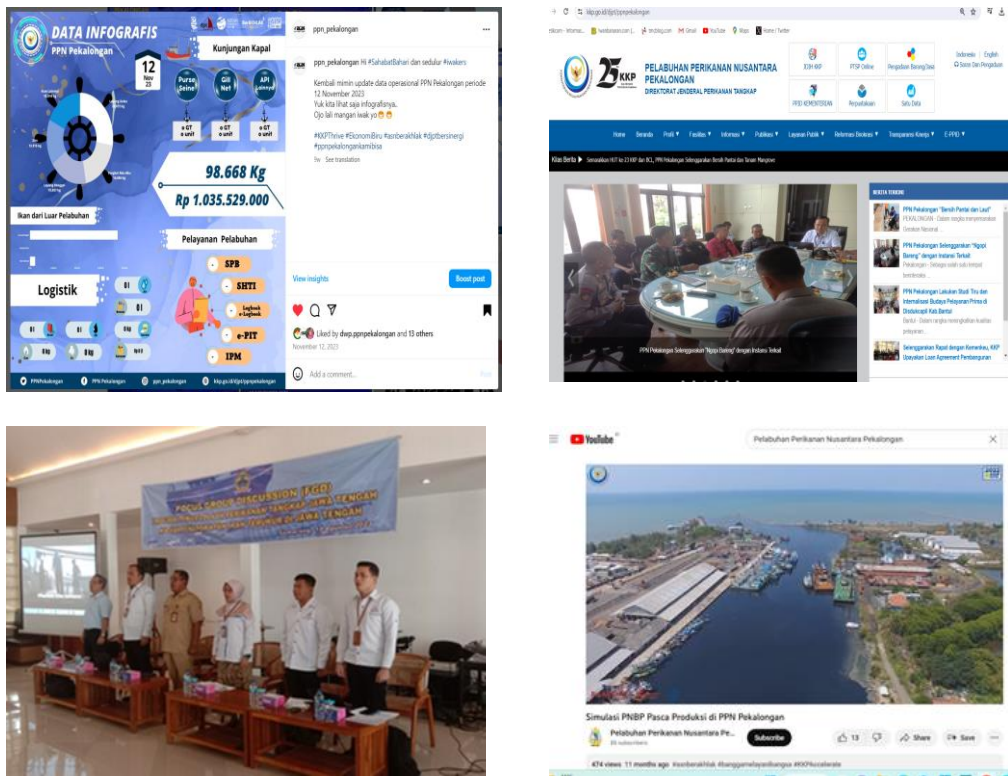
Tabel 24. Pembaharuan (*updating*) Informasi Website PPN Pekalongan Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah pembaharuan (<i>updating</i>)
1.	Januari	2 kali
2.	Februari	1 kali
3.	Maret	2 kali
4.	April	1 kali
5.	Mei	1 kali
6.	Juni	1 kali
7.	Juli	1 kali
8.	Agustus	3 kali
9.	September	2 kali
10.	Oktober	Tidak Ada
11.	November	2 kali
12.	Desember	Tidak ada

Kegiatan pendampingan pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala PPN Pekalongan, dilakukan saat ada kunjungan pejabat atau rapat dengan pejabat, misalnya Menteri, Direktur Jenderal, Walikota, atau pejabat lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop bertajuk Apresiasi Kehumasan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 22-24 Oktober 2023 di Hotel Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Pejabat Humas instansi pemerintah, praktisi media sosial, dan *voice over talent*.

Gambar 7. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan



5. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5)

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang dengan berbagai karakter untuk melakukan aktivitas perikanan yang menimbulkan suatu keramaian. Oleh karena itu, perlu adanya peran pelabuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian lingkungan yang meliputi kegiatan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keselamatan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan bersih. Pelaksanaan K 5 di PPN Pekalongan dilaksanakan oleh Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) yang terdiri 12 orang tenaga keamanan dari PT Surya Kencana Servis (SKS) dan 14 orang tenaga kebersihan dari PT Ward Servis Indonesia (WSI).

Adapun pelaksanaan tugasnya diatur melalui jadwal piket dan dibagi pada masing-masing lokasi di wilayah kerja dan operasional PPN Pekalongan.

Gambar 8. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan & Keselamatan Kerja



6. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan penilaian dari pengguna jasa pelabuhan yang dilakukan secara berkala terhadap kegiatan pelayanan publik di PPN Pekalongan. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Survei Kepuasan Masyarakat di PPN Pekalongan telah menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud. Perangkingan dari nilai unsur terendah ke unsur tertinggi pada Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 25. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan I Tahun 2023

No	Rangking (dari unsur terendah ke unsur tertinggi)	Pertanyaan tentang	Nilai Rata-rata per unsur	Nilai Rata-rata tertimbang
1	U8	Kualitas sarana	3,59633	0,40
2	U4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,642202	0,40
3	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,678899	0,40
4	U2	Prosedur pelayanan	3,743119	0,41
5	U3	Kecepatan pelayanan	3,7706422	0,41
6	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,779817	0,42
7	U1	Persyaratan pelayanan	3,807339	0,42
8	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,8440367	0,42
9	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,853211	0,42

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I PPN Pekalongan dari 10 (sepuluh) jenis pelayanan bernilai = 92,72 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 26. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan II Tahun 2023

No	Rangking (dari unsur terendah ke unsur tertinggi)	Pertanyaan tentang	Nilai Rata- rata per unsur	Nilai Rata- rata tertimbang
1	U8	Kualitas sarana	3,363636	0,37
2	U4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,545455	0,39
3	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,545455	0,39
4	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,590909	0,40
5	U2	Prosedur pelayanan	3,636364	0,40
6	U3	Kecepatan pelayanan	3,636364	0,40
7	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,636364	0,40
8	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,681818	0,41
9	U1	Persyaratan pelayanan	3,681818	0,41

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II PPN Pekalongan dari 10 (sepuluh) jenis pelayanan bernilai = 89,77 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 27. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan III Tahun 2023

No	Rangking (dari unsur terendah ke unsur tertinggi)	Pertanyaan tentang	Nilai Rata- rata per unsur	Kategori
1	U8	Kualitas sarana	3,53	B
2	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,54	A
3	U5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,55	A
4	U2	Prosedur Pelayanan	3,60	A
5	U6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,60	A
6	U1	Persyaratan pelayanan	3,61	A
7	U4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,61	A
8	U3	Kecepatan Pelayanan	3,64	A
9	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,67	A

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III PPN Pekalongan dari 10 (sepuluh) jenis pelayanan bernilai = 89,85 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 28. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan IV Tahun 2023

No	Rangking (dari unsur terendah ke unsur tertinggi)	Pertanyaan tentang	Nilai Rata-rata per unsur	Kategori
1	U8	Kualitas sarana	3,48	B
2	U9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,50	A
3	U2	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,53	A
4	U3	Prosedur Pelayanan	3,55	A
5	U5	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,58	A
6	U1	Persyaratan pelayanan	3,62	A
7	U4	Kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,67	A
8	U6	Kecepatan Pelayanan	3,73	A
9	U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,75	A

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV PPN Pekalongan dari 10 (sepuluh) jenis pelayanan bernilai = 90,05 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

7. Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan merupakan salah satu upaya guna menyampaikan berbagai informasi terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan PNBP Pasca Produksi. Selain itu, kegiatan ini merupakan sarana *sharing session* antara pengguna jasa dengan pihak PPN Pekalongan terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan PNBP Pascaproduksi, terutama terkait mekanisme serta alur proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Februari 2023 bertempat di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pekalongan yang dihadiri oleh 30 orang meliputi pemilik kapal, pengurus dan Nakhoda kapal perikanan. Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Arahan serta sambutan yang disampaikan oleh Kepala PPN Pekalongan Bapak Kartono, A.Pi., M.P.;
2. Pemaparan Materi oleh Bapak Cipto Hadi, S.Kel. dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Pemaparan Materi oleh Bapak Rofiq Widadi, S.T., M.T dari Inspektorat Jenderal;
4. Sesi diskusi dan tanya jawab.

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa penetapan kebijakan pemungutan PNBP Pasca Produksi yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2023 berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada seluruh pelabuhan perikanan yang telah ditunjuk. Setiap kapal perikanan nantinya wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya pada pelabuhan pangkalan dan menerapkan PNBP dengan sistem Pasca Produksi. Tujuan kebijakan ini berkaitan dengan keberlanjutan perikanan yang mengacu pada potensi perikanan lestari. Zona penangkapan perikanan dibagi kedalam 6 zona baru sehingga kapal dapat memperluas wilayah tangkapan dan meningkatkan produksi perikanan. Setiap pelaku usaha akan memperoleh kuota penangkapan secara tetap yang dibagi dalam beberapa kapal, kapal yang telah berlayar diperbolehkan melakukan penangkapan Kembali asalkan kuota yang ditetapkan masih tersedia.

Perbedaan sistem pasca produksi dengan praproduksi terletak pada pembayaran PNBP yang dilakukan setelah kapal melakukan trip dan didasarkan oleh hasil jumlah tangkapan ikan, indeks tarif serta harga acuan ikan, harga acuan ikan disetiap Pelabuhan kemungkinan akan berbeda-beda, hal tersebut disesuaikan dengan harga ikan di wilayah pendaratan ikan. Kapal yang sudah mengurus perizinan dengan sistem pascaproduksi akan mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan pangkalan dan melakukan penimbangan secara online selanjutnya hasil penimbangan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam menetapkan nilai PNBP yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik kapal.

Dalam rangka mendukung operasional penangkapan dan efisiensi layanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan aplikasi baru yaitu Penangkapan Ikan Terukur secara elektronik (ePIT) yang telah terintegrasi dengan 7 aplikasi lainnya. Aplikasi e-PIT tersedia dalam dua akun khusus untuk nahkoda dan pemilik kapal. Nahkoda wajib mengisi hasil tangkapan yang didapatkan pada aplikasi e-PIT, kemudian pemilik akan menyetujui laporan dari nahkoda. Sistem akan memunculkan tarif PNBP yang harus dibayarkan oleh pemilik.

Gambar 9. Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan



8. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan

Kegiatan Diseminasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Juni

2023 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan dan dihadiri oleh sekitar 30 orang yang berasal dari instansi terkait, pemilik/pengurus kapal dan ABK/nelayan, dan bertindak sebagai narasumber adalah Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran Jajang Hartono, A.Pi..

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Menyampaikan berbagai informasi terbaru dan teraktual dalam hal pelaksanaan Kesyahbandaran guna mendukung pelaksanaan Kebijakan PNBP Pasca Produksi;
2. Melaksanakan diskusi serta koordinasi antara PPN Pekalongan dengan para pelaku usaha lingkup PPN Pekalongan dan PPP Klidang Lor;
3. Menerima berbagai aspirasi dari para pelaku usaha lingkup PPN Pekalongan dan PPP Klidang Lor yang pada saat ini menjadi subjek penarikan PNBP Pasca Produksi.

Narasumber kegiatan ini menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan Kebijakan PNBP Pasca Produksi pada sub sektor perikanan tangkap yang telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, para Syahbandar yang bertugas di Pelabuhan Perikanan yang telah ditunjuk wajib untuk menerapkan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (Aplikasi e-PIT). Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Aplikasi Standar Laik Operasi Elektronik (e-SLO), Aplikasi Teman SPB dan sistem Billing guna menunjang pembayaran PNBP Pasca Produksi itu sendiri. Penerapan Aplikasi e-PIT diwajibkan bagi kapal perikanan dengan Izin Pusat baik yang telah berizin Pra Produksi ataupun Pasca Produksi yang hendak melaksanakan kegiatan operasional penangkapan ikan ataupun pengangkutan ikan.

Namun demikian, hingga sampai saat ini, penerapan Kebijakan PNBP Pasca Produksi khususnya pada PPN Pekalongan baru sebatas pada Aktivasi Aplikasi e-PIT bagi kapal perikanan dengan Izin Pusat. Hal tersebut dikarenakan lama waktu penangkapan ikan bagi kapal Izin Pusat di PPN Pekalongan paling cepat mencapai waktu 3 bulan sehingga hingga saat ini belum terdapat kapal yang selesai melaut dan melakukan pembayaran PNBP Pasca Produksi.

Pelaksanaan instalasi Aplikasi e-PIT bagi para pemilik kapal ataupun Nakhoda dilakukan pada saat kapal perikanan hendak mengajukan permohonan penerbitan dokumen Standar Laik Operasi dan dokumen Persetujuan Berlayar.

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP Pasca Produksi mulai diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sejak tanggal 1 Januari 2023 bagi seluruh kapal perikanan dengan Ijin Pusat di seluruh Pelabuhan Perikanan yang telah ditunjuk. Penerapan kebijakan PNBP Pasca Produksi di lapangan dilaksanakan melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Elektronik (e-PIT) yang terintegrasi oleh system TemanSPB. Aplikasi tersebut memungkinkan para pemilik kapal ataupun Nakhoda untuk mengajukan permohonan secara mandiri dalam hal permohonan penerbitan SLO, Persetujuan Berlayar, pengisian data logbook penangkapan ikan oleh Nakhoda serta perhitungan dan pembayaran PNBP secara mandiri oleh pemilik kapal.

Hingga kini seluruh Pelabuhan Perikanan di Kawasan Pantura Jawa Tengah telah melakukan aktivasi serta pendampingan kepada para pemilik maupun Nakhoda kapal perikanan yang hendak melakukan operasional penangkapan ikan. Namun terdapat kendala yang lain yakni bahwa para Nakhoda kapal penangkap ikan sebagian belum memahami tata cara pengisian data logbook penangkapan ikan pada Aplikasi e-PIT. Dengan demikian, Syahbandar wajib melakukan pendampingan mengenai tata cara penggunaan dan pengisian Aplikasi e-PIT tersebut.

Gambar 10. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi



9. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan pelaku usaha serta nakhoda kapal penangkap ikan untuk menerapkan Aplikasi Elogbook Penangkapan Ikan, serta dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait dengan optimalisasi penggunaan Elogbook Penangkapan Ikan guna meningkatkan PNBP Pascaproduksi, diselenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang yang berasal dari instansi terkait, pemilik/pengurus kapal, dan ABK/nelayan yang berasal dari Kawasan Kota Pekalongan dan sekitarnya.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemilik, pengurus, dan nakhoda kapal perikanan terkait dengan regulasi serta tata aturan tentang penerapan elogbook Penangkapan Ikan.
2. Menyampaikan penjelasan tentang informasi terbaru terkait dengan pembaharuan penerapan eLogbook Penangkapan Ikan.
3. Meningkatkan komunikasi dan sinergi antara pengguna jasa dengan PPN Pekalongan dalam hal implementasi eLogbook Penangkapan Ikan.

Adapun susunan acara pada kegiatan Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Kepala PPN Pekalongan.
2. Pemaparan Materi tentang Penerapan eLogbook Penangkapan Ikan oleh Ketua Kelompok Kerja Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bapak Aris Budiarto, S.Pi., M.Si.
3. Sesi diskusi dan tanya jawab.

Hasil kegiatan sosialisasi diatas adalah bahwa Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan penangkapan ikan. Data

Logbook yang dikumpulkan memiliki bermacam fungsi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan kedepan, di antaranya untuk menghitung potensi sumber daya ikan di WPPNRI dan menghitung alokasi usaha penangkapan ikan di suatu perairan serta melaksanakan analisis tingkat kepatuhan para pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Selain itu, data Logbook Penangkapan Ikan juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kuota hasil tangkapan dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Penerapan Logbook Penangkapan Ikan diwajibkan bagi setiap kapal penangkapan ikan berukuran >5 GT. Pengisian data Logbook Penangkapan Ikan wajib dilakukan dengan menggunakan Aplikasi ELogbook Penangkapan Ikan. Sedangkan kapal perikanan ukuran sampai dengan ukuran 5GT wajib menginput data logbook penangkapan ikan yang disederhanakan. Pengisian data logbook penangkapan ikan yang disederhanakan dapat dilakukan di laut pada saat kegiatan penangkapan ikan atau di Pelabuhan Perikanan setelah kegiatan pendaratan hasil tangkapan berlangsung.

Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah disampaikan oleh Nakhoda selanjutnya diverifikasi dengan mengacu pada beberapa aspek, yang meliputi: kesesuaian daerah penangkapan ikan, kesesuaian API dengan jenis ikan yang didaratkan, kesesuaian hasil tangkapan yang dilaporkan melalui *logbook* dengan data *landing*, kesesuaian ukuran kapal dengan jumlah hasil tangkapan, kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan kesesuaian data setting dengan lama waktu melaut.

Adapun kendala yang sering dihadapi di lapangan yakni terjadinya aplikasi yang eror serta terdapat handphone yang tidak terkoneksi dengan GPS yang mengakibatkan aplikasi tersebut tidak dapat digunakan. Kendala tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran Aplikasi ELogbook Penangkapan Ikan untuk ke depan.

Gambar 11. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan



10. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah di PPN Pekalongan

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah di PPN Pekalongan dilaksanakan pada hari Senin, 4 September 2023 di Balai Pertemuan Nelayan. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemilik kapal Nakhoda dan pengurus kapal perikanan terkait dengan regulasi dan tata aturan tentang penerapan SICEFI Daerah;
2. Menyampaikan penjelasan tentang informasi terbaru terkait dengan pembaharuan penerapan SICEFI;
3. Menjalinkan komunikasi yang harmonis dan sinergi antara pengguna jasa dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dalam hal implementasi Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan dengan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Ade yang merupakan Tim IT dari Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Dalam sambutannya, Kepala PPN Pekalongan menyampaikan beberapa hal, antara lain bahwa saat ini telah terbit Surat Edaran Menteri KP perihal pembaharuan

SKKP bagi kapal perikanan dengan perizinan berusaha Pasca Produksi yang dapat diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Pelaksanaan penerbitan SKKP melalui mekanisme SE Menteri ini sebagai upaya dalam mendukung pelaksanaan PNPB Pasca Produksi bagi kapal perikanan yang akan melaksanakan operasi penangkapan ikan. Dinamika penerapan kebijakan masih terus mengalami banyak perubahan dikarenakan hingga saat ini KKP khususnya DJPT sedang berada dalam masa transisi sehingga terdapat banyak hal yang masih terus mengalami perubahan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Izin Daerah adalah bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menerapkan SKKP melalui amanat UU nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga, PPN Pekalongan dalam hal ini sebagai UPT pusat yang membina Pelabuhan perikanan daerah di Kawasan pantai utara Jawa Tengah harus selalu siap mensosialisasikan perubahan kebijakan mengenai penerbitan SKKP kepada pelaku usaha.

Selanjutnya, PPN Pekalongan dalam melakukan pelayanan SKKP harus selalu mensosialisasikan dan membimbing pelaku usaha karena untuk kapal daerah masih banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai SICEFI daerah ini.

Gambar 12. Sosialisasi Penerapan Aplikasi SICEFI Bagi Kapal Perikanan Izin Daerah di PPN Pekalongan



11. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Juni 2023 di Balai Pertemuan PPN Pekalongan.

Peserta kegiatan ini sebanyak 50 (tiga puluh) orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup, Perum Perindo Cabang Pekalongan, Satwas SDKP Kota Pekalongan, Komandan Kapal Patroli Ditpolairud Polda Jawa Tengah, HNSI Cabang Kota Pekalongan, pemilik/pengurus kapal, pedagang pengecer ikan, Pokdarwis Kecamatan Pekalongan Utara, serta petugas kebersihan PPN Pekalongan.

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Tahun Anggaran 2023 yaitu, Kepala PPN Pekalongan Bapak Kartono, A.Pi., M.P., dan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Adi Setiawan, S.E. Sedangkan moderator pada kegiatan ini adalah APK APBN Ahli Muda Bapak Bambang Priyono, S.H.

Dalam kegiatan ini, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, menyampaikan materi terkait Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan. ISO 14001:2015 merupakan standar Internasional yang menentukan persyaratan untuk pendekatan manajemen yang terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Sistem Manajemen Lingkungan 14001:2015 merupakan system manajemen instansi/perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan, dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Sejak tahun 2022, PPN Pekalongan mulai melaksanakan penerapan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dengan dibentuknya Organisasi Manajemen Lingkungan dengan ruang lingkup Penghematan Energi (Air dan Listrik) di kawasan Kantor Utama, Pos Terpadu, dan Wisata Bahari. Namun demikian, seiring dengan perkembangan waktu, sejak tahun 2023 ruang lingkup penerapannya lebih luas

meliputi kebersihan pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas air, kualitas udara, penggunaan air, penggunaan listrik, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Selanjutnya, narasumber kedua menyampaikan disampaikan materi terkait pengertian sampah, kategori sampah, dasar hukum pengelolaan sampah, sampah yang dihasilkan oleh manusia. Data tahun 2021, timbunan sampah di Kota Pekalongan mencapai 216 ton/hari, dimana komposisinya: sampah belum terkelola sebanyak 56 ton/hari (31%) dan sampah yang sudah terkelola sebanyak 150 ton/hari (69%). Adapun sampah yang terkelola tersebut terdiri dari 128 ton/hari (58%) masuk ke TPA; dan 24 ton/hari (11%) dikelola oleh unit pengelola sampah swasta.

Untuk mengelola sampah yang benar, ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Mengubah pola pikir:
 - Sampah bukan lagi sampah yang tidak bermanfaat;
 - Mengelola sampah berarti investasi, terutama untuk Kesehatan;
 - Mengelola sampah itu mudah dan sederhana;
2. Penerapan prinsip 3R:
 - *Reduce* (mengurangi timbunan sampah);
 - *Reuse* (menggunakan kembali sampah yang telah digunakan);
 - *Recycle* (mendaur ulang sampah yang dihasilkan).

Pada akhir kegiatan, dilakukan diskusi dengan para peserta dan simulasi pembuatan kompos menggunakan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Gambar 13. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan



12. Pelaksanaan ISO 14001:2015

Pada tahun 2022, PPN Pekalongan mulai menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 meskipun ruang lingkupnya terbatas, yaitu pada isu penghematan energi, dan cakupannya hanya meliputi Kantor Pelabuhan, Pos Pelayanan Terpadu, dan Kawasan Wisata Bahari. Dalam perkembangannya, pada tahun 2023, ruang lingkupnya meluas di seluruh kawasan Pelabuhan.

Pada tanggal 5 September 2023 dilakukan audit eksternal (*surveillance*) dari PT QAI Indonesia. Adapun rekomendasi dari kegiatan *surveillance* ini adalah sebagai berikut:

1. PPN Pekalongan perlu membuat kebijakan lingkungan yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan;

2. Terkait dengan target sasaran lingkungan, harus segera disusun untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Manajemen Lingkungan. Pengukuran dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala;
3. Guna peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, perlu diikuti kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Pengetahuan, dan Pengalaman yang memenuhi standard. Kegiatan ini tidak hanya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, tetapi juga instansi non pemerintah;
4. Lebih intensif dalam pelibatan pihak luar (eksternal), misalnya dengan melakukan kampanye persuasif melalui media cetak untuk mengajak masyarakat lebih peduli lingkungan. Mekanisme pemberian *reward & punishment* dapat dilakukan untuk mendorong pihak luar lebih bersemangat dalam mendukung penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan;
5. Lebih aktif dalam publikasi di media sosial, melalui pembuatan konten-konten yang berisi ajakan untuk lebih peduli pada lingkungan, misalnya terkait 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Publikasi konten peduli lingkungan ini bisa dilakukan seminggu dua atau tiga kali, sebagai bentuk pelaksanaan komunikasi untuk mencapai program dan tujuan lingkungan secara efektif dan efisien;
6. Perlunya perencanaan dan pengendalian penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, misalnya jadwal pemeliharaan/pemberian pupuk untuk tanaman, penggantian tempat sampah yang sudah tidak layak;
7. Manajemen resiko dan manajemen tanggap darurat perlu segera ditetapkan, misalnya terkait dengan anggota tim, sarana dan prasarana, serta *standard operational procedure* (SOP).

Seiring dengan pelaksanaannya, penerapan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan juga dilaporkan melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Aplikasi Tata Kelola dan Lingkungan Pelabuhan Perikanan) yang berisi program kegiatan manajemen lingkungan di Kawasan Pelabuhan Perikanan. Adapun program tersebut meliputi program kegiatan yang sifatnya wajib (*mandatory*) maupun tambahan (*voluntary*).

Program mandatory meliputi: pengelolaan sampah organik dan anorganik, penghematan listrik dan air, pengelolaan IPAL, pembuatan sumur resapan/biopori, luasan

ruang terbuka hijau, pengukuran kualitas udara dan air kolam Pelabuhan, pengukuran air limbah pelabuhan, penyediaan penampungan oli bekas, kepatuhan tenan, pengangkutan sampah, pelaksanaan sertifikasi dan surveillance ISO 14001:2015. Sedangkan program kegiatan yang sifatnya tambahan antara lain: pengambilan sampah dari TPS, pengendalian limbah cair, menyesuaikan suhu AC, laporan K 5, pengelolaan TPS, desalinasi air laut. Untuk tahun 2023, PPN Pekalongan pada aplikasi SELARASKAN memperoleh skor 85, dengan menjalankan 18 program *mandatory* dan 11 program *voluntary*.

Gambar 14. Pelaksanaan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan



13. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan dan Cara Penanganan Ikan yang Baik

Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) adalah sertifikat yang diberikan kepada awak kapal perikanan yang telah lulus mengikuti pelatihan keterampilan tentang cara penanganan dan penyimpanan ikan yang baik di atas kapal, supaya hasil tangkapan nelayan dapat dipelihara dan tidak menurun kualitasnya sejak ikan ditangkap sampai ke unit pengolahan dan distribusi.

Sedangkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan saat di atas kapal sampai dengan kegiatan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan.

Pada tahun 2023, PPN Pekalongan tidak menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (SCPIB) karena tidak ada permohonan dari pengguna jasa.

14. Diskusi Ringan “Ngopi Bareng” dengan Instansi Terkait

PPN Pekalongan menggelar diskusi ringan bertajuk “Ngopi Bareng” bersama instansi terkait pada Rabu, tanggal 15 November 2023 bertempat di Ruang Rapat PPN Pekalongan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengidentifikasi serta mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan di kawasan Pelabuhan. Permasalahan tersebut antara lain terkait Regulasi, Tata Kelola Kapal, Perizinan kapal perikanan, Keamanan dan Ketertiban, Kebersihan Lingkungan, dan lain-lain.

Kegiatan dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan, Kartono, dihadiri oleh Kabid Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Komandan Satpolairud Polres Pekalongan Kota, Komandan Pos TNI AL Pekalongan Kota, Komandan Kapal Pengawas Ditpolair POLDA Jateng, Koordinator Satwas SDKP Wilker Pekalongan, Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Wilker Pekalongan, perwakilan KSOP Kelas IV Tegal Wilker Pekalongan, dan staf terkait.

Adapun beberapa agenda yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain: pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP pascaproduksi di PPN Pekalongan; dukungan instansi terkait: K5, perijinan daerah dari DPM-PTSP, tertib administrasi terkait persyaratan berlayar; rencana pembangunan kantor pelayanan kesyahbandaran dan PNBP pascaproduksi di pelabuhan binaan; pengaturan tertib bandar, alur, proses bongkar ikan, dan pelaporan STBL kedatangan; kondisi TPI untuk memudahkan pembongkaran; Ketertiban dan keamanan terpadu kawasan pelabuhan;

peningkatan jalan dan perbaikan drainase; kesehatan dan asuransi ABK kapal perikanan; dan hal-hal lain yang berkembang.

Gambar 15. Kegiatan Diskusi Ringan “Ngopi Bareng” bersama Instansi Terkait



15. Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Agustus 2023 di Balai Pertemuan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan, Kartono, A.Pi., M.P. dan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri atas para pelaku usaha perikanan tangkap di lingkup PPN Pekalongan meliputi pemilik atau pengurus kapal, pengguna jasa Wisata Bahari, bakul ikan, dan akademisi Universitas Pekalongan. Sedangkan narasumber dalam kegiatan ini adalah Subkoordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Syarif Hidayat, S.St.Pi.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan sarana untuk melaksanakan diskusi serta menyampaikan berbagai informasi terkini di lingkup PPN Pekalongan khususnya terkait pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan PNBK di PPN Pekalongan. Dalam

sambutannya, Kepala PPN Pekalongan menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan hingga kini terus mengalami transformasi dan terus-menerus mengalami kemajuan. Salah satu fokus kebijakan pemerintah saat ini dalam bidang kelautan dan perikanan adalah optimalisasi pelaksanaan PNBP khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Guna melaksanakan upaya optimalisasi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Subkoordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha selaku narasumber menyampaikan materi terkait “Sosialisasi Pelayanan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021”. Penerapan Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi merupakan salah satu program utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang akan mulai diterapkan secara global pada Tahun 2023. Penerapan Kebijakan PNBP Pasca Produksi di PPN Pekalongan rencana akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, PPN Pekalongan telah menyediakan sarana dan prasarana yakni meliputi kesiapan dermaga, tempat pendaratan ikan serta pagar kawasan TPI yang telah tersedia. Adapun tarif pada Kebijakan PNBP Pasca Produksi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni untuk kapal penangkap ikan berukuran <60 GT adalah sebesar 5% nilai produksi ikan pada saat didaratkan per kg. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran >60 GT adalah sebesar 10% nilai produksi ikan pada saat didaratkan per kg.

Adapun jenis pelayanan jasa di PPN Pekalongan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Adapun jenis pelayanan jasa yang diselenggarakan di PPN Pekalongan yang berbayar yakni sebagai berikut :

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Pas Masuk TPI;
- Pelayanan Pas Masuk Wisata Bahari;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam;
- Pelayanan Sewa Kendaraan dan Peralatan Berat.

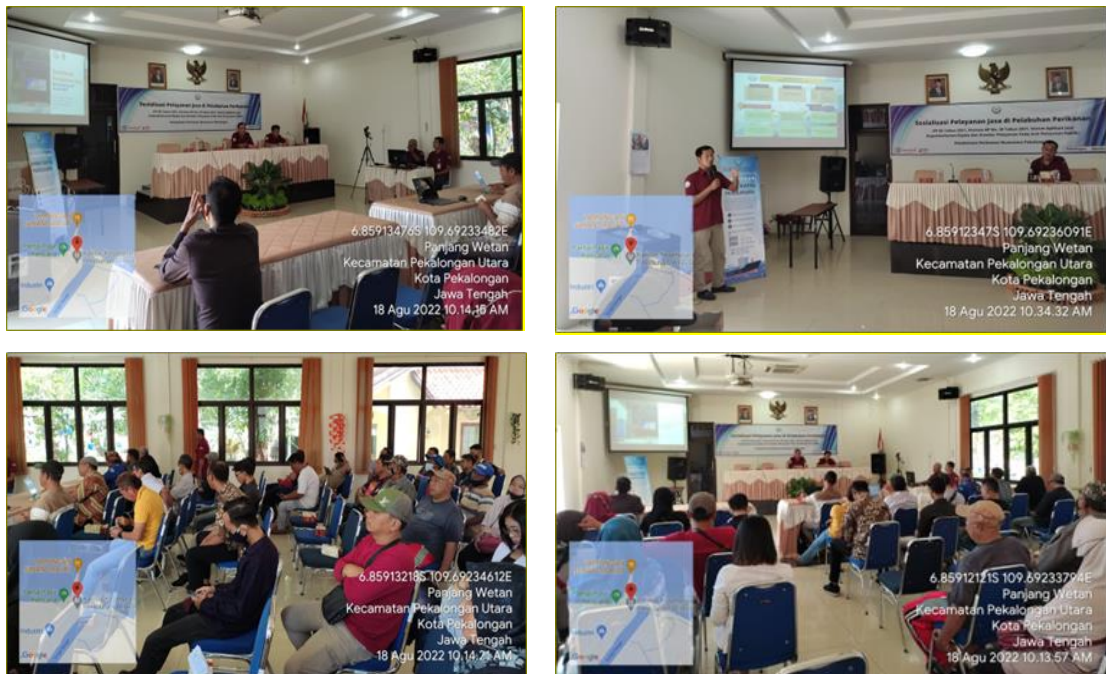
Sedangkan jenis pelayanan publik yang telah ditetapkan Standar Pelayanannya yakni sebagai berikut :

- Pelayanan Persetujuan Berlayar.

- Pelayanan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.
- Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
- Pelayanan Aktivasi Elogbook Penangkapan Ikan.
- Pelayanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).
- Pelayanan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan.
- Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
- Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Pas Masuk).
- Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Tambat Labuh).
- Pelayanan Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan (Kantin Wisata Bahari).

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan diskusi/tanya jawab dengan para pengguna jasa terkait materi yang disampaikan.

Gambar 16. Sosialisasi Pelayanan Jasa di PPN Pekalongan



16. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah)

Dalam rangka membangun jiwa raga yang sehat pada pegawai, maka perlu dilakukan kegiatan fisik /olah raga dan juga siraman rohani/jiwa. *Men sana in corpore sano*, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan jiwa dan raga yang prima menjadi modal dasar bagi para pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Adapun kegiatan tersebut meliputi: senam pagi Bersama, kerja bakti, dan siraman rohani/tausiyah.

Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari jumat pagi. Senam Pagi Bersama dilaksanakan setiap hari Jum'at minggu ke II setiap bulannya, sedangkan Kerja Bakti dilaksanakan pada minggu ke I dan ke III, dan pada minggu ke IV dilaksanakan kegiatan siraman rohani/tausiyah. Ketiga kegiatan tersebut biasanya melibatkan instansi terkait. Adapun lokasi untuk senam pagi adalah di halaman depan Kantor PPN Pekalongan. Lokasi untuk pelaksanaan kerja bakti bervariasi, yaitu jalan depan kantor PPN Pekalongan, dermaga TPI PPN Pekalongan, Wisata Bahari PPN Pekalongan, atau di dalam kantor dan ruang kerja. Karena kebersihan lingkungan kantor dan ruang kerja PPN Pekalongan juga penting demi kenyamanan dalam bekerja. Pelaksanaan Kegiatan Siraman Rohani/tausiyah dilaksanakan di Balai Pertemuan PPN Pekalongan, dengan mengundang Mubaligh/Ustadz dari Kota Pekalongan dan sekitarnya, dan tema yang disampaikan menyesuaikan.

Gambar 17. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (tausiyah)





17. Pembanguna Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di PPN Pekalongan dilaksanakan pada 15 Maret 2019 oleh Bapak Nur Arif Azizi (Inspektorat Jenderal) dan Bapak Rymston B. Situmorang (Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap).

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PPN Pekalongan meliputi 6 (enam) area, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang merupakan komponen pengungkit. Sedangkan unntuk komponen hasil meliputi Birokrasi Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ZI-WBK di PPN Pekalongan didampingi dan diasistensi oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dan Inspektorat II Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPN Pekalongan terus berupaya untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai data dukung WBK. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat internal dalam rangka penilaian mandiri maupun konsultasi dengan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dilakukan secara daring maupun secara luring.

Pada puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Kementerian Kelautan dan

Perikanan, PPN Pekalongan mendapatkan penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Inspektur V Bapak Jayeng Catur Purewanto didampingi Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Bapak Yuliadi kepada Kepala PPN Pekalongan Bapak Kurmawan, dalam kegiatan “Pembinaan Pegawai dalam rangka Persiapan Penilaian Tim Penilai Nasional dalam Penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Tata Kelola Keuangan dan Aset di PPN Pekalongan”.

Pembangunan ZI-WBK merupakan sesuatu yang bersifat kontinyu, sehingga, dalam pelaksanaannya PPN Pekalongan terus menerus untuk menjaga komitmen para pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi, menerapkan sistem pengawasan internal secara baik, menciptakan kualitas komunikasi dua arah antara pemberi dan penerima layanan berjalan baik, melalui terselenggaranya pengukuran kepuasan masyarakat dan adanya forum konsultasi publik.

Pada tahun 2023, Pembangunan ZI-WBK di PPN Pekalongan tetap dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dimana kegiatan rapat rutin internal dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian rencana kerja dilaksanakan setiap Tri Wulan. Pada tanggal 11-14 April 2023, dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK di PPN Pekalongan oleh Inspektorat V, Itjen, KKP. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Inspektorat V memberikan rekomendasi agar dokumen pendukung di beberapa area agar dilengkapi, sehingga PPN Pekalongan bisa kembali diusulkan untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN-RB.

Namun demikian, pada tahun 2023 ini, PPN Pekalongan belum berhasil lolos untuk bisa dinilai oleh Tim Penilai Nasional.

Gambar 18. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di PPN Pekalongan



B. Kegiatan Fisik

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Segala bentuk kegiatan pembangunan diharapkan memberikan multiplier effect yang luas terhadap pengguna jasa pelabuhan. Adapun rincian kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan melalui DIPA Tahun Anggaran 2023.

1. Peningkatan Jalan Khusus Komplek

Dalam rangka peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan guna mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPN Pekalongan melakukan kegiatan

pekerjaan peningkatan jalan khusus komplek. Ini dilakukan karena jalan komplek pelabuhan sudah rusak akibat seringnya terendam air banjir rob.

Adapun tahapan pekerjaan peningkatan jalan khusus komplek meliputi konsultasi terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Konsultan Perencana Pekerjaan Peningkatan Jalan Khusus Komplek

Nilai Kontrak : Rp 6.900.000,00

Pelaksanaan : April-Mei 2023

b. Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Khusus Komplek

Nilai Kontrak : Rp 17.896.000,00

Pelaksanaan : Februari-Maret 2023

c. Pekerjaan Peningkatan Jalan Khusus Komplek

Nilai Kontrak : Rp 177.600.000,00

Pelaksanaan : April-Mei 2023

Gambar 19. Peningkatan Jalan Khusus Komplek



2. Peninggian Dermaga Bongkar

Dalam rangka peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan guna mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPN Pekalongan melakukan kegiatan pekerjaan peninggian dermaga bongkar. Pekerjaan ini dilakukan guna mengatasi banjir rob yang sering melanda area pelabuhan, terutama area dermaga bongkar. Banjir rob yang terjadi sering kali menjadi penghambat kegiatan bongkar ikan di TPI.

Adapun tahapan pekerjaan peninggian dermaga bongkar meliputi konsultasi terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Konsultan Perencana Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 17.896.000,00
Pelaksanaan : Februari-Maret 2023
- b. Konsultan Pengawas Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 11.875.000,00
Pelaksanaan : Mei-Agustus 2023
- c. Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 199.670.000,00
Pelaksanaan : Mei-Agustus 2023

Gambar 20. Peninggian Dermaga Bongkar



3. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan

Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian, maka suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Tujuannya adalah monitoring terhadap kegiatan operasional pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan, agar semua kegiatan dapat dinilai dan dipantau perkembangannya. Jika ada permasalahan dapat langsung terselesaikan dengan baik.

Selain monitoring yang dilakukan internal, PPN Pekalongan juga melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang

akan melakukan aktivitas pembangunan di kawasan PPN Pekalongan agar tidak menyalahi master plan yang telah ditentukan dan dibuat sebelumnya. Berikut merupakan detail kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan pelabuhan yang telah dilaksanakan :

- a. Pemeliharaan Gedung Aquarium dan Gedung Pertemuan Wisata Bahari senilai Rp 149.000.000,00 (Mei-Juni 2023)
- b. Pemeliharaan Jalan Aspal Hotmix senilai Rp 199.677.000,00 (Juni-Agustus)
- c. Pemeliharaan Alur Lalu Lintas Keluar Masuk Kapal/Normalisasi/Pengerukan senilai Rp 177.131.000,00 (Juli 2023)
- d. Pemeliharaan Taman Wisata Bahari senilai Rp 90.300.000,00 (November-Desember 2023)

C. Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pemeliharaan fasilitas dan bangunan di pelabuhan penting untuk dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas supaya berfungsi dengan baik sesuai kondisi semula. Pendataan dan monitoring perlu dilakukan secara kontinyu, supaya langkah untuk mengantisipasi dan melakukan perbaikan fasilitas dapat lebih efektif dan efisien. Langkah antisipasi lebih diutamakan karena bangunan yang ada di tepi pantai rawan terhadap kondisi lingkungan terutama ombak laut dan korosi yang di akibatkan oleh air laut. Dikhawatirkan apabila monitoring rutin tidak dilakukan akan terjadi kerusakan bangunan yang berakibat fatal pada bangunan lain maupun pada pegawai maupun stakeholder yang berada di lokasi tersebut. Selainitu, monitoring fasilitas berperan penting sebagai acuan untuk pemeliharaan dan penganggaran tahun berikutnya. Sehingga pada tahun anggaran 2023 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan menganggarkan kegiatan Inventarisasi dan investigasi kerusakan fasilitas. Adapun item-item pekerjaan inventarisasi kerusakan fasilitas dapat dilihat di kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

1. Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan

Untuk mengatasi permasalahan di PPN Pekalongan diatas, maka dilakukan rencana pengembangan PPN Pekalongan yang diawali dengan kegiatan perencanaan (DED dan Review Masterplan) diperkirakan dilaksanakan pada semester II pada

tahun 2022 dan kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan konstruksi mulai semester II tahun 2023 (selama 2 tahun).

2. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

a. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

PPN Pekalongan pada tahun anggaran 2023 melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dalam yaitu gedung kantor, sehingga diharapkan semua fasilitas gedung ini dapat mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Adapun kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan di PPN Pekalongan yang dimasukkan dalam DIPA TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

No.	Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	Luas	Satuan	Keterangan
A.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
1.	Gedung Kantor (bangunan gedung permanen)	513	m ²	Baik
2.	Balai Pertemuan Nelayan (bangunan gedung pertemuan permanen)	181	m ²	Baik
B.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			
1.	Pagar batas wisata bahari (tanda batas administrasi kepemilikan)	600	m ¹	Baik
2.	Anjungan/ Gardu pandang (Dermaga)	154	m ²	Baik
3.	Gazebo (bangunan gudang terbuka)	8	Unit	Baik
4.	Gedung Syahbandar lama (gedung pertemuan permanen)	48	m ²	Baik
5.	Rumah Dinas wr.Supratman (rumah negara gol.II tipe C)	135	m ²	Baik
6.	Pos Jaga Wisata Bahari (gedung pos jaga permanen)	9	m ²	Baik
7.	Pos Satpam TPI (gedung pos jaga permanen)	18	m ²	Baik
8.	Gedung Laboratorium Mini (gedung laboratorium permanen)	100	m ²	Baik

9.	Gedung Pertemuan Wisata Bahari (gedung pertemuan permanen)	300	m ²	Baik
10.	Gedung Aquarium (gedung pertemuan permanen)	300	m ²	Baik
11.	Ruang Genset (gudang tertutup permanen)	30	m ²	Baik
12.	Menara Air Bersih (sumur artesis)	2	UNIT	Baik
13.	Bangunan Menara/ BakPenampung (TPI Selatan dan Kantor)	2	UNIT	Baik
14.	Gudang Kantor (gudang tertutup permanen)	25	m ²	Baik
15.	MCK WB dan TPI (bangunan MCK)	156	m ²	Baik
16.	Pos Terpadu (gedung pos jaga permanen)	181	m ²	Baik
17.	Gedung TPI Higienis (bangunan tpi permanen)	400	m ²	Baik
18.	Taman Wisata Bahari (jalan khusus kompleks)	1,500	m ²	Baik
19.	Depo Logistik (gedung pertokoan/ koperasi/ pasar permanen)	168	m ²	Baik
20.	Wahana Edukasi Air (gedung olah raga kolam renang)	300	m ²	Baik
21.	Bangunan Navigasi Mercusuar (menara suar listrik non diesel)	1	UNIT	Baik
22.	Pagar Keliling Onshore (tugu/ tanda batas administrasi kepemilikan)	208	m ²	Baik
23.	Tempat Peristirahatan Nelayan (gedung pertemuan permanen)	100	m ²	Baik
24.	Sheetpile Wisata Bahari (krib pengaman sungai/ pantai)	81	m ¹	Baik
25.	Talud Wisata Bahari (bangunan penguat tebing/ pantai)	356	m ¹	Baik
26.	Revetment Samping Kantor (dermaga)	32	m ²	Baik
27.	Sheetpile Onshore (break water timur 2)	350	m ¹	Baik
28.	Breakwater Barat	320	m ²	Baik
29.	Breakwater Timur 1	275	m ¹	Baik
30.	Pemeliharaan Pagar Kawasan Timur	710	m ¹	Baik

31.	Pasar Pengecer	135	m ²	Baik
32.	Dermaga Barat	346	m ¹	Baik
33.	Dermaga Timur	130	m ¹	Baik
34.	Pemeliharaan Bangunan SWRO	305	m ²	Baik
35.	Mess Operator	85	m ²	Baik
36.	Pos Jaga Gapura Utara	20	m ²	Baik
37.	Pos satpam II (timur sungai) NUP 4	30	m ²	Baik
38.	Garasi PPNP (Gedung garasi/ pool permanen)	80	m ²	Baik
39.	Tempat parkir TPI Utara (Gedung garasi/ pool permanen)	70	m ²	Baik
40.	Ikon Wisata Bahari	1	Unit	Baik
C. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
1.	Jalan Komplek Pelabuhan (jalank husus kompleks) NUP 1	9,626	m ²	Baik
2.	Pemeliharaan Paving Wisata Bahari (jalan khusus kompleks) NUP 15	3,775	m ²	Baik
3.	Hotmix Wisata Bahari (jalan khusus kompleks)	1,315	m ²	Baik
D. Pemeliharaan Irigasi				
1.	Pemeliharaan Alur [10 HARI x 10 KEG x 1 THN]	100	Hari	Rata-Rata 1.8 m LWS
2.	Pemeliharaan Drainase Kawasan	1,500	m ¹	Baik
E. Pemeliharaan Jaringan				
1.	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1	Tahun	Baik
2.	Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	1	Tahun	Baik

b. Pemeliharaan Peralatan Penunjang dan Kendaraan Operasional

Untuk kegiatan pemeliharaan/ perawatan sarana operasional pelabuhan yang dimasukkan dalam DIPA TA.2023 meliputi kegiatan pemeliharaan peralatan penunjang, pemeliharaan jaringan, dan pemeliharaan/ operasional kendaraan dinas khusus. Sarana yang tersedia harus dipelihara secara berkala

agar peralatan operasional selalu siap digunakan dalam mendukung kegiatan operasional di PPN Pekalongan. Adapun rincian kegiatan pemeliharaan/perawatan sarana operasional pelabuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Operasional Pelabuhan

No	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Operasional Pelabuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Peralatan Penunjang Operasional Kantor			
1.	Pemeliharaan & Operasional Pompa Air	2	Unit	Baik
2.	Pemeliharaan dan Operasional Pompa Filter Wahana Edukasi Air	1	Unit	Baik
3.	Pemeliharaan dan Operasional Genset	3	Unit	Baik
4.	Pemeliharaan Running Text	1	Unit	Baik
5.	Pemeliharaan Penyemprot Air Bertekanan Tinggi	1	Unit	Baik
6.	Pemeliharaan Solar Cell	94	Unit	Baik
7.	Pemeliharaan Lampu Ornamen Ikan	1	Tahun	Baik
8.	Pemeliharaan Single Post	1	Tahun	Baik
9.	Pemeliharaan Neon Box	2	Unit	Baik
10.	Pemeliharaan Drone	1	Unit	Baik
11.	Pemeliharaan Mainan Anak	19	Unit	Baik
12.	Pemeliharaan Steger	1	Tahun	Baik
13.	Pemeliharaan Videotron	1	Unit	Rusak
B	Kendaraan dinas khusus			Unit
1.	Pemeliharaan dan Operasional Forklift	3	Unit	Baik
2.	Biaya pemeliharaan dan operasional Excavator	1	Unit	Baik
3.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Tongkang Bermesin	1	Unit	Baik
4.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Truck Crane	1	Unit	Baik

5.	Pemeliharaan & Operasional Dump Truck	2	Unit	Baik
6.	Pemeliharaan dan Operasional Suction Dragger	1	Unit	Baik
7.	Pemeliharaan dan Operasional SWRO	1	Unit	Baik

BAB VI. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

I. Permasalahan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pokok dan fungsi PPN Pekalongan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat (*public service*) memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Beberapa kali terjadi perubahan pada anggaran sehingga harus dilakukan revisi halaman III DIPA yang mempengaruhi Nilai IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran;
- 2) Kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih, menyebabkan adanya *automatic adjustment* (AA) terhadap anggaran semua Kementerian/Lembaga yang berdampak juga pada anggaran Unit Pelaksana Teknis PPN Pekalongan;
- 3) PPN Pekalongan merupakan pelabuhan perikanan yang memanfaatkan Sungai Loji sebagai kolam dan alur pelayaran, sehingga tingkat sedimentasi tinggi baik dari laut maupun dari sungai dan adanya sumber kontaminasi terhadap produk yang berasal dari kontaminasi limbah industri, rumah tangga dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan alur pelayaran menjadi dangkal yang sering menyebabkan kandasnya kapal perikanan sehingga kapal awalnya akan membongkar muatannya di PPN Pekalongan membatalkannya dan mengalihkan ke Pelabuhan lain, sehingga berdampak pada jumlah produksi ikan di PPN Pekalongan;
- 4) Lokasi PPN Pekalongan berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pekalongan, dimana tingkat penurunan tanahnya tinggi (rata-rata 5,7 cm per tahun), sehingga sering dilanda banjir pasang air laut (rob). Meskipun saat ini telah dibangun parapet/tanggul di sepanjang dermaga PPN Pekalongan, tetapi banjir rob masih tetap menggenangi meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya;
- 5) Pelimpahan kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan,

sementara jumlah dan lokasi kapal yang mengajukan permohonan SKKP tidak sebanding dengan jumlah SDM Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP).

- 6) Masyarakat perikanan (pemilik/pengurus/nakhoda/ABK) belum sepenuhnya memahami kebijakan baru Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Penerapan PNBP SDA Perikanan pascaproduksi sehingga masih adanya manipulasi data produksi ikan yang dilaporkan untuk menghindari pembayaran PNBP SDA Perikanan pascaproduksi yang tinggi.

II. Upaya Pemecahannya

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guna pemecahan masalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan anggaran dan kegiatan yang lebih presisi, untuk meminimalisir revisi, baik revisi DIPA maupun POK;
- 2) Mengoptimalkan realisasi anggaran dari semua kegiatan;
- 3) Sebagai solusi jangka pendek, dilakukan pemeliharaan alur pelayaraan (Sungai Loji), dengan melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator/ponton secara rutin;
- 4) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan *onshore*, serta pengembangan fasilitas pelabuhan yang lebih memadai, sehingga pelabuhan lebih layak teknis dan lebih higienis, serta dapat memacu peningkatan produksi ikan di PPN Pekalongan;
- 5) Penambahan serta peningkatan kapasitas SDM Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP) melalui Diklat dan sejenisnya;
- 6) Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP pasca produksi secara intensif kepada masyarakat perikanan.

BAB VII. PENUTUP**1. Kesimpulan**

- a) Optimalisasi Penyerapan Anggaran PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2023 mencapai 99,30% dari target yang ditentukan sebesar 100%;
- b) Capaian Indikator Kinerja Utama PPN Pekalongan secara keseluruhan mencapai 115,83%;
- c) Dari jumlah kapal perikanan > 30 GT yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Pekalongan 100% sudah menggunakan alat pembeku (freezer), sehingga mempengaruhi peningkatan kualitas ikan yang didaratkan serta harga ikan yang dipasarkan atau dijual;
- d) Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik telah dilaksanakan dengan baik meskipun hasilnya belum optimal;
- e) Pada tahun 2023, PPN Pekalongan telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) untuk pelabuhan di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Meskipun belum optimal, tetapi pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal dan penerbitan SKKP berjalan lancar.
- f) Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi di PPN Pekalongan telah berjalan pada tahun 2023, meskipun belum tercapai target yang ditentukan.

2. Saran dan Kritik

- a) Untuk mengoptimalkan penyusunan laporan tahunan masing-masing penanggungjawab kegiatan pada akhir tahun agar menyusun bahan laporan sebagaimana dimaksud untuk segera dikumpulkan pada Subbagian Umum, sehingga penyusunan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat;

- b) Masing-masing penanggungjawab kegiatan agar dapat mendokumentasikan/ mengarsipkan setiap jenis kegiatan yang digunakan sebagai bahan laporan, sehingga penyusunan laporan tahunan dapat disusun secara lengkap;
- c) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan dituangkan dalam rencana operasional kegiatan;
- d) Terkait dengan asset PPN Pekalongan, perlu adanya koordinasi lebih lanjut dan intensif dengan PT Perindo Cabang Pekalongan mengenai status kepemilikan BMN guna tertib asset dan pengelolaannya;
- e) Terus mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap agar segera membangun pelabuhan *onshore* guna lebih meningkatkan produksi perikanan PPN Pekalongan;
- f) Mendukung pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi sebagai salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha, sehingga dapat berjalan optimal dan tercapai target yang ditentukan.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan PPN Pekalongan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada khususnya maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perikanan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.